

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN BERBAGAI PARADIGMA DALAM KAJIAN AKUNTANSI

Ali Djamhuri

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165 Malang
email: alidjam@gmail.com

Abstract: Social Sciences and Various Paradigms in Accounting Discourse. Accounting discourse in Indonesia nowadays can illustrate the monolithical view that is dominant. Besides economic science, social science, especially sociology is rarely used as analysis tool in accounting. Following Covalleski's (1986), sociology, psychology and anthropology are other disciplines that are beneficial in accounting discourse. This would lead to multiparadigm science. As an implication, accounting would be dealt with in a no more monolithical manner. Positivism, interpretivism, critical, postmodernism or even spiritualism paradigms have as much chance to be employed. The most difficult hindrance is our reluctance and fear, as academics, to carry out a more open and understanding scientific trajectory; although it will give more benefit to all stakeholders.

Abstrak: Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi. Diskursus akuntansi di Indonesia saat ini bisa mengilustrasikan cara pandang monolitik yang dominan. Selain ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial, terutama sosiologi, terkesan masih relatif jarang dipakai sebagai alat analisis, khususnya dalam akuntansi. Jika mengikuti pendapat Covalleski (1986), paling tidak sosiologi, psikologi dan antropologi adalah disiplin-disiplin lain yang sangat bermanfaat bagi kajian akuntansi. Hal ini mengarah pada suatu *multiparadigm science*. Implikasinya, akuntansi dapat dikaji dengan modus yang tidak lagi monolitik. Paradigma positifis, interpretif, kritis, posmodernis atau mungkin spiritualis memiliki peluang yang sama pentingnya untuk digunakan. Hambatan tersulitnya, adalah keengganan dan ketakutan kita, para akademisi akuntansi sendiri, untuk melakukan suatu *scientific trajectory* yang lebih terbuka dan saling memahami, padahal ini lebih memberikan manfaat kepada lebih banyak pihak yang bekepentingan.

Kata Kunci: Paradigma akuntansi, perspektif sosiologi, riset akuntansi, studi organisasi



Djamhuri,
Ilmu
Pengetahuan
Sosial Dan
Berbagai
Paradigma
Dalam Kajian
Akuntansi

Sebuah artikel di jurnal *Academy of Management Review* Volume 15 No. 4 Tahun 1990 yang ditulis oleh Gioia dan Pitre (1990) benar-benar telah menyita perhatian saya lebih banyak dari bahan-bahan bacaan lainnya. Artikel yang berjudul *Multiparadigm Perspectives on Theory Building* tersebut diawali dengan kutipan dari George Sarton (1929) yang terdapat dalam buku *The Civilization of the Renaissance* (1959). Sarton (1929) mengatakan: “*The most difficult thing in science, as in other fields, is to shake off accepted views*” (Gioia dan Pitre, 1990). Tulisan ini sama sekali tidak dimaksudkan secara khusus untuk membahas orang-orang yang berada di dunia ilmiah, yang menurut Sarton sangat sulit melepaskan cara pandang keilmuan yang selama ini dianutnya. Namun tidak bisa disangkal, karena tujuan tulisan ini ingin mengeksplorasi tentang kaitan antara ilmu sosial dengan paradigma akuntansi, sesuatu yang umumnya masih dianggap baru, bahkan *heterodox* (Zafirovski, 2003), artinya menyimpang atau keluar dari normalitas atau kebiasaan yang dianut oleh sebagian besar ilmuwan, maka sangat mungkin beberapa hal mengenai mereka akan tidak bisa dihindari sedikit terungkap melalui tulisan ini.

Harus dimaklumi, pengenalan seorang ilmuwan dengan suatu perspektif keilmuan tertentu dapat berlangsung dengan mudah, tetapi tidak jarang juga berlangsung penuh kesulitan. Sesekali bahkan hal itu harus dibayar oleh yang bersangkutan dengan pelepasan keyakinan ilmiah yang selama ini sudah dianutnya. Analoginya, boleh jadi seperti “kemurtadan” dalam ranah keilmuan. Oleh karena itu wajar saja jika han-

ya sedikit ilmuwan yang berani dan mau melakukannya, biasanya hanya mereka yang memiliki *spirit of discovery* yang tinggi yang mampu menyadari bahwa di balik setiap yang berisiko tinggi justru ada peluang memperoleh manfaat yang tinggi pula.

Gagasan utama yang ingin disampaikan melalui tulisan ini adalah pernyataan bahwa klaim ilmiah atas suatu konsep ilmu, proses keilmuan, atau hasil penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan klaim yang bersifat relatif. Ia tergantung dari sudut pandang atau perspektif keilmuan (ada yang menyebut perspektif teoretik atau paradigma) mana yang dipakai untuk mengukurnya. Setiap penelitian, termasuk dalam bidang akuntansi, memiliki asumsi-asumsi filosofis serta fondasi teoritisnya sendiri. Oleh sebab itu, adalah penting untuk mengenali dan menilai dengan tepat setiap asumsi filosofis dan dasar teoritik yang melandasi setiap jenis penelitian ilmiah untuk menjamin bahwa baik asumsi filosofis maupun dasar teoritik yang dipakai dalam penelitian ilmiah tersebut konsisten dengan keyakinan atau paradigma keilmuan yang dianut oleh si peneliti.

Untuk mencapai tujuan penulisannya, sistematika tulisan ini disusun sebagai berikut. Bagian pertama akan mencoba mengulas masalah pemahaman konvensional atas akuntansi, yaitu pemahaman atas akuntansi yang sekarang ini dominan karena dianut oleh sebagian besar akuntan maupun akademisi akuntansi. Di bagian kedua, uraian bagian pertama tersebut dicoba dikaitkan dengan *functionalism* dan perspektif *positivist*, yaitu perspektif sosiologi atau paradigma keil-

muan dan landasan filosofis yang relevan mendasari pemahaman konvensional dalam memahami akuntansi. Bagian ketiga, mencoba mendiskusikan status dan implikasi akuntansi yang menurut Ahmed Belkaoui (1992), merupakan suatu *multiparadigms discipline*. Uraian historik tentang perkembangan *multiparadigm* atau *multiple perspectives on accounting* (ada juga yang menamakan sebagai *interdisciplinairy studies on accounting*), juga dibahas di bagian ini untuk memberikan tekanan bahwa gagasan *interdisciplinary studies on accounting* bukan barang aneh yang harus “di-bonsai” perkembangannya. Bagian keempat tulisan ini, akan berusaha mengeksplorasi perbedaan beberapa perspektif sosiologis yang berkembang dalam mempelajari atau melakukan studi atas akuntansi sebagai dampak langsung adanya perbedaan perspektif sosiologis dari organisasi. Karena masing-masingnya bisa dikarakteristikkan dengan begitu banyak dasar perbedaan, maka ulasan eksploratif dalam bagian ini dicoba disajikan secara lebih singkat. Bagian terakhir, yaitu penutup, akan dipakai untuk menyimpulkan beberapa poin penting yang bisa menjadi pelajaran berharga (*valuable lesson*) bagi kita, terutama dalam menghadapi perkembangan akuntansi yang semakin cepat, sebagai dampak langsung cepatnya perkembangan berbagai hal yang melingkupinya.

Pandangan Konvensional atas Akuntansi

Memandang sesuatu secara konvensional, boleh jadi cara termudah untuk mendapatkan pemahaman atas sesuatu tersebut. Untuk diketahui saja, paling tidak untuk saat ini, cara

pandang ini mewakili cara pandang yang paling lazim. Karenanya, tak mengherankan jika ia mampu menutupi mata dan pikiran kita dari upaya mencari kemungkinan adanya cara pandang alternatif. Dalam ranah ilmu akuntansi, juga berlaku hal yang sama. Kita mengenal adanya pandangan atau pemahaman yang bersifat konvensional. Pada seksi atau bagian ini akan secara khusus dikupas cara pandang tersebut. Pertama, karena pemahaman konvensional atas akuntansi dianut oleh sebagian besar kita yang berada di dunia akuntansi. Dampaknya, masyarakat memiliki miskonsepsi seolah-olah cara pemahaman konvensional ini merupakan satu-satunya cara pemahaman atas akuntansi. Meskipun sedikit mengherankan, terbukti miskonsepsi serupa juga tidak sedikit ditemukan di kalangan akademisi di bidang akuntansi, sehingga mereka pun bersikap *monolithic* dalam perilaku ilmiahnya, yaitu dalam melihat cenderung hanya memakai satu cara pandang dalam menyikapi obyek-obyek kajian keilmuannya. Kedua, karena pemahaman konvensional terlanjur telah dianggap sebagai sesuatu yang *taken for granted*, maka inovasi-inovasi ilmiah di bidang akuntansi yang semestinya bisa berlangsung di dunia akademik, khususnya perguruan tinggi, kurang mendapatkan respon yang memadai. Di saat disiplin-disiplin ilmu sosial lain mengalami perkembangan akibat dari keberanian para ilmunawannya mengadopsi cara pandang keilmuan yang lebih pluralistik, sikap ilmiah yang *monolithic* tersebut jelas kurang selaras dengan modus zaman maupun keinginan untuk cara terus-menerus mengem-

Djamhuri,
Ilmu
Pengetahuan
Sosial Dan
Berbagai
Paradigma
Dalam Kajian
Akuntansi

bangkan disiplin akuntansi. Ringkasnya, ada semacam *resistance to change* dari sebagian kalangan yang tidak terbiasa dengan cara berpikir yang *multiple perspectives*.

Dalam pemahaman konvensional ini, akuntansi sebagaimana didefinisikan oleh *American Accounting Association* dalam *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) tak lebih hanya sebagai:

“proses mengidentifikasi, mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan dihasilkannya pertimbangan dan keputusan yang tepat dan rasional oleh para pengguna informasi ekonomi tersebut” (Belkaoui, 1992, p. 22; Roslender, 1992, p. 2).

Akuntansi ditempatkan lebih pada tataran praktis, yakni semata-mata sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Pendefinisian akuntansi seperti ini tidak berarti salah atau keliru, karena kerangka konseptual (*conceptual framework*) dari mana pengertian-pengertian akuntansi dan standar akuntansi mendapatkan rujukannya, memang menekankan perlunya akuntansi diletakkan pada ranah praktis ini, yaitu dengan memasukkan *decision usefulness* sebagai kriteria terpenting di dalam menyeleksi prinsip atau konsep yang bakal dipakai sebagai acuan dalam pengembangan standar akuntansi. Namun jarang kita menyadari, bahwa penekanan yang agak berlebihan pada aspek praktis tersebut berimplikasi akuntansi menjadi terkungkung dan semata-mata ditempatkan dalam kerangkeng besi (*iron cage*) tujuan pengambilan keputusan yang nalar (*reasonable*), se-

mentara derajat kenalarannya (*reasonableness*) untuk sebagian besarnya hanya disandarkan kepada ukuran rasionalitas (baca “kepentingan”) para pemegang saham dan para kreditur semata. Akibat lanjutannya akan tampak pada, misalnya, penggunaan profit (keuntungan ekonomis) sebagai representasi utama keberhasilan dari hubungan akuntabilitas di suatu organisasi dalam mana akuntansi mendapatkan peran pentingnya, yaitu perusahaan. Kenyataan yang demikian bukan tidak bermanfaat, namun patut disadari hal itu telah mengabaikan adanya ukuran-ukuran keberhasilan lain yang sangat boleh jadi memiliki aspek penting bagi kelompok masyarakat lainnya. Kritik seperti ini telah terbukti benar, misalnya dengan makin kuatnya keinginan masyarakat internasional untuk menekaikan kalangan bisnis dan akuntansi agar memerhatikan aspek kelestarian lingkungan sehingga organisasi bisnis akan tumbuh dengan apa yang kini dikenal dengan modus pertumbuhan *sustainable growth*. Sekedar untuk diketahui, jika misalnya mengikuti secara konsisten pemikiran ekonomi Milton Friedman, seorang tokoh pemikiran ekonomi positif, tugas dan fungsi satu-satunya perusahaan adalah mencari untung sebanyak-banyaknya dan memberikannya sebagai kontribusi nilai tambah kepada para pemiliknya, nggak ada sama sekali kaitannya dengan keharusan memelihara kelestarian lingkungan. Mengapa demikian, karena upaya yang terakhir tersebut berlawanan dengan azas perolehan keuntungan dan kebebasan sebagai pilar utama kapitalisme.

Dengan demikian, pemahaman konvensional secara im-

plisit berasumsi bahwa organisasi yang memerlukan akuntansi sebagai alat penyampaian informasi akuntabilitasnya adalah organisasi swasta (*private*), lebih khusus lagi, organisasi swasta yang menerapkan pemisahan antara mereka yang memiliki kekayaan (pemegang saham) dengan yang berperan sebagai pengelola kekayaan, yaitu para manajer, sehingga di dalamnya ditemukan adanya hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam konteks ini, bahkan diasumsikan hanya terdapat dua kelompok utama yang terlibat dalam hubungan keagenan, yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda namun sama-sama sebagai makhluk ekonomi murni (*pure economic creature*) yang sepenuhnya *rational* dan *opportunistic*, yakni *principal* dan *agent*. Asumsi-asumsi implisit tersebut jarang kita eksplorasi, padahal asumsi tersebut justru menjadi asumsi dasar, atau – dalam istilahnya Smith (Smith, 1998) disebut sebagai *bedrock assumptions* yang di atasnya dibangun seluruh bangunan teoritik ilmu akuntansi. Bagi mereka yang menekuni filsafat ilmu pengetahuan dengan baik, selalu ada kekhawatiran atas setiap *bedrock assumptions* yang dimiliki oleh suatu disiplin ilmu pengetahuan, yaitu jika *bedrock assumption* yang ada tersebut terbukti tidak memiliki atau terlampaui jauh keterkaitannya dengan hakikat atau kondisi alamiah (*natural*) obyek yang disumsikan tersebut. Jika terjadi hal seperti ini, maka bangunan ilmiah yang berada di atasnya sangat rentan runtuh oleh argumen lain atau ilmu pengetahuan yang dibangun akan mudah menghasilkan anomali keilmuan (keanehan atau keti-

dak terjawaban sesuatu secara ilmiah). Sekadar contoh sederhana tentang sah tidaknya *bedrock assumption* tersebut, misalnya kita bertanya “apa benar manusia sepenuhnya *rational* dan sepenuhnya pula mewakili makhluk ekonomi?”. Saat kemudian kita mendapatkan bukti, bahwa bahkan di dunia ilmiah sekalipun terdapat istilah *homo homini lupus*, *homo socius*, *homo religious*, *homo sapien*, *homo logicum*, dan berbagai istilah serupa lainnya, maka terbukti bahwa para ilmuwan – pada hakikatnya – sampai hari ini belum memiliki definisi atau pengertian tunggal yang tepat mengenai siapa manusia itu sendiri. Kenyataan seperti ini, akan berimplikasi luas terutama terhadap ilmu pengetahuan mengenai manusia (*human sciences*), misalnya secara filosofis kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini: “Jika secara ilmiah definisi manusia sendiri belum pasti, apakah secara ilmiah motivasi, keinginan, kepentingan, atau perilaku manusia juga bisa diprediksikan dengan pasti?”.

Jika konteksnya adalah suatu organisasi yang terdapat hubungan keagenan, memang secara logis akan memunculkan kebutuhan terhadap akuntansi sebagai sarana penyedia informasi akuntabilitas, tepatnya sebagai salah satu *monitoring tool* agar dapat terhindar dari ketidak-simetrisan informasi antara *principal* dan *agent*. Selama sifat organisasinya adalah *profit seeking* dan hanya memiliki dua pihak yang berkepentingan, yakni *principal* dan *agent*, serta memisahkan secara tegas peran antara prinsipal dengan agen, maka akuntansi akan memberi manfaat yang optimum, karena fenomena empirik memang akan mendukung atau

Djamhuri,
*Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi*

sesuai dengan seluruh asumsi yang dijadikan dasar pijakannya. Namun, jika situasi organisasinya tidak seperti itu, misalnya organisasi di sektor publik atau organisasi non-pemerintah (NGO) yang kepentingan prinsipalnya (publik atau masyarakat) jelas tidak semata-mata aspek ekonomi atau keuangan (bahkan sangat bervariasi), maka bisa dipastikan penggunaan laporan keuangan konvensional sebagai laporan akuntabilitas utama akan menimbulkan distorsi informasi, suatu keadaan di mana informasi akuntansi tidak sepenuhnya mampu memenuhi apa yang diharapkan oleh para penggunanya. Salah satu penyebabnya adalah hakikat atau esensi akuntabilitas yang berbeda antara yang ada di perusahaan dengan yang ada di lingkungan organisasi sektor publik. Oleh sebab itu, upaya menyamakan keduanya yang saat ini gencar dilakukan oleh lembaga-lembaga donor internasional melalui program-program *New Public Management* seperti penerapan *accrual accounting*, misalnya, sama artinya dengan penyeragaman *model of accountability* dalam organisasi sektor publik *toward a private or accountant's model of accountability*. Dampak jangka panjangnya jelas bukan sekadar dampak teknis prosedural, namun juga dampak perilaku dan sosial yang sangat luas (Rosenbloom dan Yaroni, 1992; Farazmand, 1999), karena ia terkait dengan filosofi "*privatization of everything*". Pada titik ini, kita sudah bisa menduga siapa pihak yang bakal diuntungkan dan siapa pula pihak yang bakal dirugikan baik secara nasional maupun internasional. Yang pasti, keduanya terkait dengan masalah pemilikan modal.

Sebagian besar akuntan praktisi, karena mereka memang cenderung pragmatis, tampak tidak mempedulikan apakah ada perbedaan yang sangat signifikan antara berbagai model akuntabilitas yang mempengaruhi pula model-model pemenuhannya. Mereka bahkan sangat menikmati kondisi ini. Yang cukup aneh adalah para akuntan akademisi yang juga ikut terjebak pada keyakinan buta (*blindly belief*) yang hanya mengedepankan aspek pentingnya akuntabilitas sehingga perlu diterapkan di semua jenis organisasi tanpa mencoba berpikir apakah konsep akuntabilitas sebenarnya suatu konsep yang bersifat tunggal atau *plural*?. Jika demikian, apakah akuntabilitas, sebut saja tipe A, akan cocok diterapkan untuk organisasi jenis B?. Jika tidak sepenuhnya, pada aspek mana semestinya penyesuaian dilakukan?. Bagi kita yang berada di dunia akademik, pertanyaan itulah yang seharusnya kita ajukan sebelum secara apriori menyuarakan dukungan atas perlunya akuntabilitas ditegakkan di sembarang tipe organisasi. Fenomena ketidakpedulian seperti inilah yang agaknya sempat dikhawatirkan oleh Perks (1993). Menurutnya, kita cenderung menyeragamkan makna istilah akuntabilitas padahal setiap penggunaan istilah tersebut semestinya terkait dengan identifikasi **siapa yang seharusnya akuntabel?, kepada siapa akuntabilitas harus diberikan?, dengan cara bagaimana akuntabilitas tersebut harus ditunaikan, dan untuk tujuan apa akuntabilitas tersebut diberikan?** (Perks, 1993, p. 24). Tentu saja jawaban atas rangkaian pertanyaan tersebut bisa sangat berbeda untuk setiap tipe organisasi. Oleh karena itu,

salah satu kelemahan pemahaman konvensional atas akuntansi adalah kecenderungannya untuk menyederhanakan dan menyeragamkan sesuatu yang sebenarnya tidak sederhana dan tidak seragam. Akan tetapi harus disadari bahwa dari sisi falsafah ilmu, ternyata pemahaman yang konvensional seperti ini pun bukan tidak memiliki landasan filosofis atau perspektif sosiologisnya. Oleh karena itu, bagian selanjutnya dari tulisan ini akan mencoba mencari hubungan antara cara pandang konvensional dengan salah satu mazhab pemikiran keilmuan yang telah secara intensif mempengaruhi atau membentuknya, yakni *positivisme*.

Sosiologi hanyalah salah satu cabang ilmu sosial. Terdapat ilmu sosial lain seperti ilmu ekonomi, psikologi, antropologi, dan sebagainya. Jika diamati dengan lebih seksama, sosiologi atau antropologi boleh jadi dua cabang ilmu sosial yang dari awalnya telah mampu mengakomodasi banyak perspektif atau sudut pandang, sehingga suatu masalah yang sama memungkinkan memperoleh tinjauan secara berbeda, tergantung dari perspektif apa ilmuwan yang bersangkutan melihatnya. Dibandingkan di ranah ilmu ekonomi, apalagi akuntansi, diskursus atau pewacanaan tentang mazhab-mazhab pemikiran keilmuan dalam sosiologi tampak lebih mudah dijumpai. Sekadar contoh sederhana, tentang bagaimana perspektif yang berbeda bisa menghasilkan simpulan yang berbeda, lihatlah misalnya masalah akuntabilitas yang kita perbincangkan tersebut. Menurut Perks (1993), jika masalah akuntabilitas dilihat dari sudut pandang sosiologis, maka posisi seseorang atau suatu pihak,

terutama kaitannya dengan derajat kekuasaan yang dimiliki dalam hubungan akuntabilitas yang dilakukan, akan memengaruhi tingkat akuntabilitas yang harus diberikan atau dimintakan dari pihak lainnya. Jika kita menempati posisi sebagai pihak yang lebih berkuasa atas pihak yang lain, misalnya sebagai *principal*, maka kita akan cenderung meminta akuntabilitas lebih banyak dari pada yang dikehendaki atau bersedia diberikan oleh pihak yang sedang berposisi kurang kuasa (*less powerful*), misalnya *agent*. Ini berarti bahwa perspektif posisi sebagai *principal* akan menjadi penyebab perbedaan dalam melihat bagaimana akuntabilitas dibutuhkan. Seorang sosiolog akan mengatakan bahwa derajat serta ragam akuntabilitas yang disepakati untuk diminta atau disampaikan dalam suatu hubungan keagenan (hubungan akuntabilitas) sangat ditentukan oleh *power relation* yang terbentuk dalam organisasi. Akibatnya, jika akuntansi diinginkan lebih mampu melayani pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan akuntabilitas, mereka yang akan menerapkannya semestinya harus memperhatikan faktor kekuasaan, khususnya pola hubungannya. Implikasi selanjutnya adalah bahwa jika hubungan keagenannya diperluas sehingga mencakup kondisi di mana pihak yang menjadi prinsipal atau agen tidak hanya satu kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sepenuhnya sama atas entitas yang menjadi obyek hubungan akuntabilitas, maka bentuk dan isi laporan keuangan sebagai laporan akuntabilitas standar bisa dipastikan tidak akan memadai lagi sebagai alat memenuhi kebutuhan akuntabilitas pihak-pihak yang

Djamhuri,
*Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi*

berkepentingan. Salah satu sebabnya adalah, karena pola distribusi kekuasaannya tidak sepenuhnya sama dengan apa yang berlaku di perusahaan dari mana model akuntabilitas versi akuntan pada mulanya dikembangkan.

Positivisme dan Pandangan Konvensional Dalam Kajian Akuntansi

Secara kebahasaan, istilah **konvensional** selain berarti sesuatu yang berasal dari kesepakatan, juga berarti sesuatu yang berjalan sebagaimana kebiasaannya. Karena itu, yang konvensional sering menimbulkan sikap *salah kaprah* seakan ia sebagai satu-satunya yang benar. Dalam konteks inilah *conventionalism* dalam ranah teologi maupun keilmuan acapkali melahirkan apa yang kemudian kita kenal sebagai *orthodoxy* dan *heterodoxy* (Zafirovski, 2003) atau *mainstream* dan *non-mainstream*. Yang sesuai dengan konvensi disebut *orthodox* atau mengikuti arus besar (*mainstream*) pemikiran atau keyakinan, sementara yang tidak sesuai disebut dengan *heterodox* atau mengikuti pemikiran atau keyakinan yang menyimpang. Sebagaimana dalam ranah teologi, dalam dunia keilmuan terbukti juga dikenal *orthodoxy* dan *heterodoxy*. Yang lebih menarik, seperti juga sejarah masyarakat yang lebih sering ditulis oleh mereka yang sedang berkuasa (*in reign*) sehingga definisi-definisi yang dikembangkannya cenderung lebih menguntungkan mereka yang menulisnya, sejarah ilmu pengetahuan juga tidak lepas dari situasi seperti ini. Melalui definisi-definisi yang bertebaran dalam banyak teorinya, ilmu-ilmu pengetahuan yang sedang berstatus sebagai *nor-*

mal science (Kuhn, 1962), berusaha memberikan pengertian atas sesuatu yang cenderung tunggal (*monolithic*), sehingga kurang memberi ruang dialektika untuk memungkinkan terjadinya suatu diskursus yang terbuka mengenai kemungkinan terdapatnya alternatif pengertian lainnya. Situasinya bisa menjadi lebih parah jika dalam ruang-ruang kuliah, cara pengajaran yang dilangsungkan juga sama-sama monolitiknya. Salah satu contoh definisi yang cenderung monolitik adalah definisi tentang “ilmiah” atau *scientific*.

Cara pandang sebagian besar kita mengenai akuntansi terbukti juga sangat konvensional, artinya kita menempatkan diri pada posisi di dalam suatu konteks yang seakan-akan hanya ada satu cara pandang yang benar dan tidak ada lagi kemungkinan lain sebagai alternatifnya. Kita cenderung menempatkan diri pada posisi *inside the box*. Pemosisian diri *inside the box* ini telah dan akan terus berimplikasi pada upaya melihat sesuatu sebagai *taken for granted*, menerima saja sebagaimana adanya. Pada taraf selanjutnya, pemosisian diri seperti ini bahkan akan menyulitkan kita untuk melihat adanya kesalahan (anomali, kekeliruan) atau setidaknya adanya alternatif lain selain yang sudah ada saat ini. Mengacu kepada pendapat Kuhn (1962), perkembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan kemungkinan terjadinya fenomena “konvensionalisasi” dalam cara pandang ilmiah, terutama melalui apa yang dikenal sebagai *normal science*, yaitu suatu ilmu pengetahuan (bisa juga berlaku untuk paradigma) yang sedang berada di kekuasaannya (sedang dominan atau menjadi *main-*

stream). Keberadaan suatu cabang ilmu pengetahuan dalam posisi sebagai *normal science* diakui akan memudahkan bagi para ilmuwan yang bekerja di dalamnya untuk secara konsisten melakukan pengembangan lebih lanjut konsep-konsep keilmuannya. Namun pada sisi lain posisi sebagai *normal science* juga menimbulkan ketidakberanian para ilmuwan di dalamnya untuk mencoba menempatkan diri pada posisi *outside the box*, bahkan saat mereka sebenarnya mampu melihat adanya anomali-anomali dari cabang ilmu pengetahuan yang mereka tekuni selama ini. Alasan yang paling umum terjadi adalah ketakutan mereka untuk menghadapi risiko tidak diterimanya mereka oleh kalangan terbesar ilmuwan yang saat ini diuntungkan melalui berbagai saluran distribusi produk-produk keilmuannya, salah satunya adalah jurnal ilmiah. Dalam situasi di mana produktivitas karya keilmuan berpengaruh langsung atau pun tidak pada remunerasi dan karir ilmiah seseorang, maka seringkali mereka yang saat ini diuntungkan (*elite*) memagari kepentingan dirinya melalui politik penjagaan pintu gerbang (*gatekeeping policy*) dalam publikasi jurnal ilmiah ataupun seminar-seminar ilmiah. Dengan mengambil contoh *American Accounting Association (AAA)* dan *The Accounting Review* yang diterbitkannya sebagai kasus, Tom Lee (1997) menulis mengenai masalah ini dengan sangat baik di *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Dari Tulisan Lee tersebut, kita menjadi paham mengapa sejarah ilmu pengetahuan, sebagaimana dikemukakan Kuhn (1962) bukanlah sejarah evolusi yang penuh kedamaian, namun

sejarah revolusi yang penuh konflik antar mazhab pemikiran yang di dalamnya melahirkan pemikiran-pemikiran baru sebagai reaksi atas berbagai anomali yang melekat pada model-model pemikiran yang telah ortodok.

Kajian kontemporer (saat ini) tentang akuntansi (*contemporary accounting studies*), khususnya di Indonesia, harus diakui masih didominasi oleh pemahaman atau sudut pandang *positivism*. Dengan demikian *positivism* juga telah menjadi “ruh” dari konvensionalisme kajian akuntansi di Indonesia saat ini. Sebagai ruhnya konvensionalisme kajian akuntansi saat ini di Indonesia, pengaruh *positivism* ini sangat kuat, sehingga sampai tidak banyak di antara kita sebagai akuntan atau akademisi akuntansi yang menyadari bahwa *positivism*, dalam sejarah perkembangan keilmuan atau juga filsafat keilmuan (*philosophy of science*) pada dasarnya hanya **salah satu** dan **bukan satu-satunya** mazhab pemikiran keilmuan (*scientific perspective* atau *scientific paradigm*). Positivisme telah mendapatkan ortodoksinya sendiri di dunia ilmiah akuntansi di Indonesia. Oleh karenanya, ia juga dijaga dengan sangat ketat oleh para pengikutnya. Tidak mengherankan jika dalam situasi seperti timbul situasi di mana para pekerja keilmuan secara tidak sadar berlaku seperti seorang tukang jahit yang bekerja mengandalkan hanya dengan satu pola dan ukuran. Hasil akhir dari proses produksi seperti ini boleh jadi akan serupa dengan baju dengan satu ukuran (*one size*) yang diharapkan tetap mampu *fits for all*. Penerapan cara kerja keilmuan seperti itu dalam ranah ilmu pengetahuan

Djamhuri,
*Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi*

kealaman boleh jadi tak akan menimbulkan masalah (*prob-lematical*), namun jika hal itu diterapkan dalam ranah ilmu pengetahuan sosial (*social sciences*), implikasi dan risikonya sangatlah besar. Sebab utamanya, karena perilaku manusia yang menjadi obyek kajian ilmu pengetahuan sosial secara hakekat berbeda dengan karakteristik obyek kajian ilmu pengetahuan kealaman.

Jika dilakukan penyelidikan dengan lebih mendalam, kuatnya pengaruh *positivism* pada kajian-kajian akuntansi saat ini tidak terlepas dari pengaruh yang dibawa oleh ilmu ekonomi yang sampai saat ini merupakan ilmu sosial paling dominan yang mempengaruhi ilmu akuntansi. Oleh sebab itu, kajian akuntansi – setidaknya sampai saat ini – sebagian besar dilakukan dengan memanfaatkan alat bantu ilmu ekonomi, dan sampai batas tertentu ilmu psikologi (terutama untuk bidang kajian akuntansi manajemen). Hal ini berdampak pada pengadopsian yang sangat intensif oleh akuntansi atas konsep-konsep yang berasal dari kedua cabang ilmu sosial tersebut. Pada konteks berikutnya, tidak saja konsep-konsep teoretiknya, tetapi juga cara pandang (*perspective*), pendekatan (*approaches*), metodologi dan bahkan metoda penelitiannya. Pada saat ilmu ekonomi, dan juga psikologi, bersifat sangat positivistik, maka disiplin akuntansi terpengaruh menjadi sangat positivistik juga. Hal itu tampak dari perilaku sebagian besar akademisi akuntansi dan, tentu saja para akuntan praktisi, yang secara apriori mempertahankan prinsip-prinsip keilmuan yang positivistik, seperti misalnya *atomism*, *objectivism*, *nominalism*, *naturalism*, *phe-*

nomenalism, *scientific laws*, dan *value free* (Smith, 1998, p. 76).

Secara sederhana, prinsip *atomism* menyatakan bahwa ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan sosial harus memandang bahwa obyek kajiannya bersifat *descret*, yaitu sesuatu yang selain unik dan berbeda, juga sudah tidak bisa dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Bagian terkecil inilah yang akan selalu menjadi titik sentral analisis dalam semua kajian yang dilakukan. Dengan logika seperti ini, obyek-obyek kajian ilmu sosial yang bersifat kolektif seperti masyarakat, perusahaan atau organisasi akan dipandang tidak lebih sebagai agregasi atau penjumlahan dari unsur-unsur yang membentuknya. Prinsip inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi berkembangnya studi-studi keperilakuan (*behavioralism*) dalam akuntansi, khususnya akuntansi manajemen, auditing dan sistem informasi. Pada ranah filsafat ilmu pengetahuan, perilaku yang atomistik tersebut melahirkan apa yang dikenal dengan *methodological individualism*. Prinsip *objectivism* muncul sebagai dampak keyakinan para ilmuwan *positivist* bahwa secara ontologis realitas sosial itu ada dan berwujud (*tangible*) serta terpisah (*detaached*). Implikasinya mereka didorong untuk melakukan kuantifikasi atas segala sesuatu yang ingin ditelitinya.

Sementara itu prinsip *nominalism* berargumen bahwa konsep-konsep keilmuan tidak memiliki kegunaan kecuali sekadar sebagai suatu nama yang berfungsi merepresentasikan sesuatu. Yang terpenting dari prinsip ini adalah keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan tidak mengandung atau terkait

sedikit pun dengan pengaruh nilai atau budaya dari mana atau oleh kelompok masyarakat mana konsep-konsep ilmiah tersebut dikembangkan. Ini artinya ilmu diklaim sepenuhnya mampu berfungsi sebagai representasi dari fenomena yang menjadi obyek kajiannya, sama saja apakah fenomena alam atau fenomena sosial. Implikasi langsung prinsip ini terlihat pada penerapan paham *empiricism* dalam penelitian-penelitian ekonomi, psikologi dan – tentu – juga akuntansi. Dengan *empiricism* maka obyek kajian keilmuan, termasuk ilmu pengetahuan sosial, hanyalah hal-hal yang bisa dialami (*experienced*) melalui panca indera (*sense*), alias yang memiliki dimensi fisik (*physical*). Absennya dimensi fisik dari suatu obyek akan memasukkan obyek tersebut ke dalam kategori metafisika (*metaphysical*) yang sekaligus menempatkan obyek tersebut sebagai hal yang tidak layak sebagai suatu obyek kajian keilmuan. Dalam penelitian ilmu sosial yang ada saat ini, dampak nyata yang ditimbulkan nominalisme dan empirisme ini juga terlihat pada semangat yang sangat tinggi dari para *positivists* untuk mencari hal-hal lain yang dianggap mampu mewakili sesuatu (*proxy*) yang pada dasarnya tidak bisa ditangkap melalui panca indera, sebutlah misalnya masalah kebahagiaan (*happiness*), kepatuhan (*adherence*), kesejahteraan (*welfare*), dan bahkan kapitalisme. Pada ranah praktis, karena tuntutan *variability* atau keharusan adanya perubahan nilai pada hal-hal yang diproksikan, maka ujungnya adalah penggunaan pendekatan kuantitatif sebagai analisis yang dominan atas hampir semua kasus sosial (termasuk yang sebenarnya kurang

empiris karena tak bisa ditangkap oleh panca indera).

Prinsip yang lain dari ilmu pengetahuan yang berperspektif *positivist* adalah *naturalism*. Prinsip ini menekankan pada keyakinan bahwa asumsi-asumsi serta metoda yang lazim diterapkan dalam ilmu pengetahuan alam sepenuhnya bisa diterapkan dalam mengkaji fenomena sosial. Ringkasnya, seorang peneliti akan mengkaji (meneliti) perilaku manusia, masyarakat atau institusi dengan cara yang sama persis dengan apa yang dilakukan seandainya dia melakukan kajian atas reaksi kimia, atau batuan, atau - mungkin - struktur bumi dan sebagainya. Yang barangkaali lebih serius dampak langsungnya adalah pengadopsian konsep *closed system* yang berasal dari *natural science* sebagai model analisis yang diterapkan dalam ilmu sosial. Berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh para ilmuwan alam, yang memang relatif mampu melakukan pengendalian atas faktor-faktor yang berada di luar sistem (lingkungan), ilmuwan sosial, terutama para ekonom tampaknya lebih suka memasang anggapan untuk memagari model yang dibangunnya dengan mengajukan apa yang dikenal dengan konsep *ceteris paribus*. Para ilmuwan yang relatif kritis sangat sulit menerima upaya penyederhanaan yang berasal dari sikap *reductionism* seperti itu. Karena faktanya membuktikan hal yang berbalikan dengan asumsi yang dipakai sebagai pagar pelindungnya. Yang lebih menonjol disini adalah sikap *pragmatism* dan *utilitarianism* ketimbang upaya mencari yang lebih sah. Dalam konteks penggunaan konsep sistem antara konsep sistem tertutup dengan konsep sistem terbu-

Djamhuri,
*Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi*

ka, boleh jadi konsep sistem yang sebenarnya lebih mampu menggambarkan fenomena sosial adalah konsep sistem terbuka (*opened system*), bukan sebaliknya model sistem tertutup (*closed systems*). Penerapan konsep sistem tertutup, secara logika, tentu akan mengurangi daya prediksi yang dihasilkan dari model yang dibangun oleh ilmuwan yang bersangkutan. Inilah kenapa sebagian besar model analisis yang dikembangkan dalam ilmu sosial, termasuk ekonomi, adalah model statis (*static model*); bahkan jika pun model dinamis yang dicoba dikembangkan (dibangun), unsur dinamika lazimnya sebatas ditunjukkan dengan menyediakan data yang mengikuti unsur waktu secara beruntun (*time series*) di dalam model tersebut, bukan suatu eksplorasi prosedural yang mencoba menjawab pertanyaan *how* dan *why*.

Dua prinsip lainnya yang menjadi karakteristik ilmu pengetahuan yang berperspektif *positivism* adalah pertama, orientasinya untuk menghasilkan hukum-hukum keilmuan dari setiap kajian atau penelitian keilmuan yang dilakukan, serta, yang kedua, sikap dan pandangan ilmu pengetahuan yang menempatkan fakta sebagai satu-satunya dasar dari semua pernyataan ilmiah seperti teori atau hukum-hukum keilmuan. Prinsip pertama lazim dikenal dengan prinsip *nomothetical* atau *nomotetik* (Smith, 1998). Dengan prinsip ini universalitas keberlakuan hukum keilmuan akan bisa dijaga, sesuatu yang tentu saja sangat bermanfaat terutama bagi ilmu pengetahuan kealaman (*natural sciences*). Tanpa keberlakuan prinsip ini, bisa kita bayangkan betapa sulitnya teknologi bisa mengalami perkembangan. Dampak akh-

irnya adalah taraf hidup manusia yang juga ikut sulit mengalami perkembangan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang umumnya sangat tergantung kepada keberadaan teknologi yang makin canggih. Sementara itu prinsip kedua menekankan arti pentingnya bahwa seluruh pernyataan dalam ilmu pengetahuan seharusnya hanya didasarkan pada fakta-fakta yang ada, bukan atas dasar nilai (*values*). Prinsip kedua ini sekaligus memperkuat keberlakuan prinsip *nominalism*. Implikasi kedua prinsip ini adalah bahwa, pertama, ilmu pengetahuan akan berupaya secara terus-menerus untuk melakukan generalisasi (*generalization*) atas temuan penelitian serupa yang dihasilkan. Dari sini kita lalu mudah memahami mengapa tujuan ilmu pengetahuan bagi para *positivist* adalah untuk mendeskripsikan (*description*), meramalkan (*prediction*), dan mengendalikan (*control*) atas fenomena alam atau sosial. Penerapan prinsip ini pada ranah ilmu pengetahuan kealaman (*natural sciences*) tidak saja secara logika lebih tepat, namun secara operasional juga lebih bermanfaat. Hal yang perlu diingat adalah fakta bahwa bahkan dalam ranah ilmu kealaman, universalitas mutlak (*absolute universality*), tidak bisa dibangun melalui teori-teori ilmiahnya. Sebagai contoh, banyak ilmuwan fisika yang berpendapat bahwa temuan teori relativitas Einstein pada hakikatnya telah memberikan bukti yang kuat bahwa beberapa hukum fisika Newton (gravitasi) hanya berlaku khusus di bumi, di luar angkasa ternyata teori tersebut tidak berlaku. Penggunaan konsep statistika yang probabilistik sebagai alternatif dari matema-

tika yang deterministik dalam penelitian keilmuan kealaman, sebenarnya juga telah memberi suatu petunjuk, bahwa universalitas mutlak memang sulit kemungkinannya untuk bisa dicapai melalui penelitian ilmiah.

Jika klaim universalitas dalam domain ilmu pengetahuan kealaman yang obyeknya memang tidak terpengaruh oleh nilai (*values*) saja tidak mutlak, maka bagaimana mungkin tingkat kemutlakan (atau ketidakmutlakan) yang sama dapat diterapkan melalui hukum-hukum (teori) ilmu sosial yang berisi penjelasan mengenai perilaku manusia yang sangat terpengaruh oleh ruang dan waktu. Implikasi ini langsung berkaitan dengan implikasi lainnya dari ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik, yaitu bersifat *ahistory*, artinya menolak relativitas yang timbul sebagai akibat pengaruh ruang (tempat, lokasi geografis) dan pengaruh waktu (zaman atau *epoch* sejarah). Singkatnya, ilmu pengetahuan sosial pun dipaksa untuk tidak *contextual*. Dengan prinsip ini, ilmu pengetahuan sosial yang positivistik akan menolak konsep ilmiah dari mereka yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah *situated* atau *contextual*. Hal lain yang bisa dipahami dari prinsip tersebut, adalah meskipun pendekatan induktif tidak sepenuhnya diterapkan dalam model *hypothetico deductive* yang sedang menjadi bagian dari ortodoksi masa kini, pendekatan ini terbukti sangat berpengaruh dalam menghasilkan hukum-hukum keilmuan yang positivistik.

Desakan atas penerapan IFRS sebagai satu-satunya standar akuntansi yang berlaku secara umum di seluruh dunia, sebagai contoh, sangat mudah diduga berasal dari pola pema-

haman konvensional yang positivistik seperti ini. Komitmen ilmu pengetahuan positivistik atas landasan fakta, dan bukan nilai, sebagai satu-satunya dasar dari semua pernyataan keilmuan, pada satu sisi, juga akan memperkuat apa yang diusung oleh prinsip *scientific laws* atau *nomothetic* di atas. Secara logika, memang mudah diterima argumen bahwa jika sesuatu bisa berlaku umum, maka atas sesuatu itu tidak akan berlaku hukum-hukum khusus setempat (lokal) yang bisa dipastikan akan memiliki preferensi nilai (normatif). Pada tingkat yang lebih mikro, ketegangan akibat tarik menarik antara relativitas (lokalitas) dengan universalitas ini juga menimbulkan perbedaan dalam jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan apakah konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial bersifat obyektif (mengikuti universalitas) atau subyektif (mengikuti relativitas). Namun demikian, pengaruh yang paling utama dari komitmen terhadap fakta sebagai dasar segala pernyataan keilmuan adalah bahwa ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan sosial, bersifat bebas nilai (*value free*). Dengan sifat ilmu pengetahuan seperti ini, maka kajian mengenai hal-hal yang normatif, seperti agama atau juga etika – menurut alur pemikiran yang positivistik – sejauh terkait dengan benar-salah atau baik-buruk pada dasarnya tidak ilmiah. Jika prinsip ini diikuti dengan konsisten dan murni, kajian masalah agama atau etika hanya akan tergolong sebagai kajian ilmiah, manakala kajian yang dilakukan sebatas pada perilaku beragama (dalam artian relatif) atau perilaku beretika (dalam artian relatif) masyarakat yang **tampak** dan

Djamhuri,
Ilmu
Pengetahuan
Sosial Dan
Berbagai
Paradigma
Dalam Kajian
Akuntansi

dapat diamati tanpa mengkaitkan dengan apakah perilaku masyarakat tersebut termasuk benar atau salah (etis atau tidak etis).

Akuntansi Sebagai Suatu Multiparadigmatic Science

Bagian ini akan mendiskusikan tentang bagaimana akuntansi pada dasarnya memiliki status sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang dari awalnya bersifat *multiparadigmatic*. Agak mengagetkan, memang, istilah akuntansi sebagai suatu *multiparadigmatic science* justeru berasal dari buku teori akuntansi yang ditulis oleh Ahmed Belkaoui (1992), sebuah buku yang jika diukur menggunakan ukuran perkembangan pemikiran alternatif dalam akuntansi yang terjadi pada hari ini, bahkan di Indonesia, merupakan sebuah buku yang masih kental semangat positivismenya. Dibandingkan dengan tulisan Dillard dan Becker (1997) yang berjudul *Organizational Sociology and Accounting Research Or Understanding Accounting in Organizations Using Sociology*, misalnya, tulisan Belkaoui (1992) tetap mengesankan lebih positivistik. Namun di taraf apapun kadar kepositivannya, kita mesti sepakat setidaknya dua tulisan tersebut telah berkontribusi besar mengenalkan cara pandang lain mengenai akuntansi di suatu komunitas ilmiah yang didominasi oleh perspektif keilmuan yang positivistik.

Sebagaimana dijelaskan di muka, meskipun tidak berarti dalam wilayah ilmu ekonomi tidak terdapat perbedaan mazhab pemikiran, lihatlah misalnya keberadaan mazhab pemikiran monetaris, keynesian, neoklasik, atau juga ekonomi kelembagaan baik yang lama (OIE)

maupun yang baru (NIE) serta – tak ketinggalan – kebangkitan ekonomi neoliberal melalui *public choice* dan *transaction cost economics*, namun tidak bisa disangkal bahwa dibandingkan dalam ranah ilmu sosiologi, perbedaan cara pandang atau mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi tergolong tidak begitu intensif dan ekstrim dibandingkan dalam ilmu sosiologi. Paling tidak kita masih bisa berkesimpulan bahwa sebagian besar mazhab pemikiran ekonomi tersebut masih berada dalam wilayah pengaruh perspektif keilmuan *positivist*. Ekonomi kelembagaan (*institutional economics*) meskipun lebih toleran terhadap penggunaan alat analisis non kuantitatif, dan untuk sebagiannya juga toleran terhadap institusi lokal, namun karakteristik dasarnya yang rasional (dengan sedikit penyesuaian ke arah model *bounded rationality*), tetap tampil lebih sebagai representasi ilmu sosial yang *positivistik*. Ringkasnya, perbedaan mazhab pemikiran dalam ranah ilmu sosiologi lebih signifikan dan fundamental, yaitu perbedaan yang melibatkan sampai ke tingkat filosofi dasarnya. Oleh sebab itu jika dikaitkan dengan derajat intensitas pengaruh ilmu ekonomi kepada ilmu akuntansi yang sangat dalam, tidak mengherankan apabila Belkaoui (1992), setelah memperkenalkan konsep paradigma dalam kajian teori akuntansi, kemudian memberikan sebagian besar contoh paradigmanya yang masih serumpun, yakni *functionalism* (Burrell & Morgan, 1979), sebab – seperti dijelaskan di muka – dalam ilmu ekonomi pengaruh positivisme masih dominan. Selain itu, betapa pun mungkin saat ini pengaruh paham positivisme pada

Belkaoui sudah menipis¹, paling tidak saat bukunya ditulis (1992), dia masih menampilkan kesan sebagai *positivist*. Jika demikian, lalu mengapa Belkaoui (1992) berani mengajukan klaim bahwa akuntansi pada dasarnya ilmu pengetahuan yang berkarakteristik multiparadigma ?.

Michael C. Jensen (1983) seorang ilmuwan yang sangat terkenal dari *Harvard Business School*, yang juga salah seorang tokoh dalam pengembangan *theory of the firm*, menulis dengan sangat menarik di jurnal *The Accounting Review*, volume LVIII, issue ke 2, tahun 1983 dengan judul *Organization Theory and Methodology*. Dalam tulisannya, dia meyakini bahwa karena akuntansi merupakan bagian integral dari suatu organisasi, maka dengan perkembangan yang begitu pesat dalam teori organisasi, sangat tidak tepat jika para akuntan membiarkan begitu saja hiruk pikuk perkembangan teori organisasi tersebut. Menurut argumennya:

“Accounting is an integral part of the structure of every organization, and a fundamental understanding of why accounting practices evolve as they do and how to improve them requires a deeper understanding about organizations than now exists in the social sciences” (Jensen, 1983).

Pentingnya para akuntan atau akademisi akuntansi mem-

¹ Terbersit dari pembicaraan informal dengan penulis saat Belkaoui berkesempatan mengisi satu Seminar Akuntansi yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang dibiayai Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi (TKPA) di sekitar tahun 1996.

beri perhatian terhadap teori organisasi dalam riset-risetnya juga dikemukakan oleh Covaleski dan Aiken (1986). Mereka berdua berargumen, bahwa memasukkan teori organisasi sebagai teori dasar dalam riset-riset akuntansi akan meningkatkan relevansi temuan-temuan riset akuntansi mengingat tempat di mana akuntansi dipraktikkan, misalnya dalam bentuk sistem akuntansi atau *control*, adalah di dalam organisasi. Lebih lanjut, mereka menambahkan bahwa betapa pun teori-teori sosiologi terkesan sedikit lebih jauh berhubungan dengan akuntansi dibandingkan dengan pengetahuan yang berada dalam domain kajian organisasi terapan (*applied organization studies*), namun harus diingat bahwa kajian organisasi adalah wilayah sosiologi juga, sehingga mengkaji masalah akuntansi dengan menggunakan sosiologi memiliki arti strategis, yaitu mampu mengkaitkan aspek akuntansi dari level mikro, meso, dan makro sekaligus.

Merujuk kepada pernyataan Jensen (1983), beberapa pengertian sekaligus bisa kita peroleh. Pertama, bahwa domain di mana akuntansi pada akhirnya dipraktikkan adalah organisasi. Kedua, dengan menekankan bahwa konstelasi kajian atas organisasi (*organization studies*) berada dalam wilayah ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dan bukan sekadar ilmu sosial (*social science*), maka klaim bahwa kajian akuntansi bersifat *monoparadigmatic* atau *single perspective* sulit bisa diterima secara ilmiah. Lebih sulit lagi jika kita harus menerima pandangan bahwa kajian atas masalah-masalah akuntansi hanya boleh dilakukan mengikuti tradisi keilmuan yang paling dikenal selama ini, yakni ilmu

Djamhuri,
 Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi

ekonomi atau – secara terbatas – juga psikologi. Untuk sekadar memberi contoh bagaimana *multi perspectives studies on accounting* bisa dilakukan, ada baiknya disimak hasil penelitian tentang *budgeting* yang dilakukan oleh Covalleski, Evans, Luft, dan Shields yang diterbitkan di *Journal of Management Accounting Research* tahun 2003 dengan judul *Budgeting Research: Three Theoretical Perspectives and Criteria for Selective Integration* (Covalleski, Evans, Luft, & Shields, 2003). Dengan memanfaatkan sekaligus tiga ilmu sosial, yakni ekonomi, psikologi dan sosiologi, mereka berhasil menjelaskan tentang bagaimana hubungan sebab akibat yang terjadi di balik praktik penganggaran dengan lebih menyeluruh. Persoalan yang terkadang dihadapi oleh para peneliti untuk melakukan hal seperti itu adalah apakah peneliti akan melihat teori dari ilmu-ilmu sosial yang ada tersebut pada dasarnya *potential to compete each other or potential to be harmoniously combined?*. Sekali lagi, untuk menjawab masalah ini, perlu memahami asumsi dasar filosofis dari tiap-tiap teori ilmu sosial yang akan dipakai secara bersama-sama. Tanpa mengatakan untuk tidak menggunakan ilmu ekonomi dalam melakukan kajian masalah akuntansi, di antara ilmu ekonomi, psikologi, dan sosiologi, ilmu sosiologilah yang boleh jadi – setidaknya di Indonesia – masih paling rendah intensitas penggunaannya sebagai landasan perspektif teoriitik dalam kajian akuntansi. Di luar ketiganya, tentu saja, juga masih banyak ilmu sosial lain yang berpotensi untuk dijadikan landasan teoritik dalam kajian-kajian akuntansi, seperti *anthropology* (terutama jika berkaitan

dengan budaya), politik, agama, dan sebagainya.

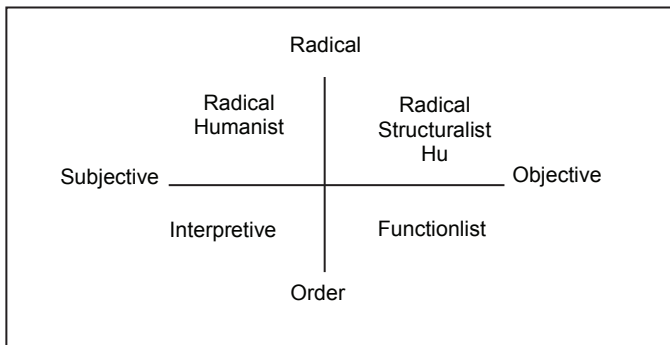
Dalam sosiologi, terutama sosiologi organisasi, Burrell dan Morgan (1979) bisa dikatakan sebagai peletak fondasi atas kategorisasi secara sistematis perspektif sosiologis dalam pengkajian atas masalah-masalah organisasi dalam mana akuntansi termasuk di dalamnya. Kontribusi karya Burrell dan Morgan (1979) ini tidak saja dalam bentuk suatu cara yang lebih mudah yang ditawarkan bagi para peneliti berikutnya untuk melakukan pemetaan atas dasar perspektif sosiologis atau paradigma (*sociological perspectives or paradigms mapping*) atas berbagai teori atau hasil penelitian keorganisasian (termasuk akuntansi) yang telah dilakukan sebelumnya, namun sekaligus juga memberikan pencerahan berupa ruang potensi penelitian ilmiah yang lebih terbuka luas, sesuatu yang sebelumnya belum banyak diketahui atau disadari oleh para ilmuwan sosial. Selanjutnya, dengan mengacu kepada pendapat Hopper dan Powell (1985), kita bisa menambahkan sumbangan yang telah diberikan oleh tulisan karya Burrell dan Morgan (1979) tersebut, yaitu sebagai jembatan yang sangat bermanfaat yang menghubungkan antara disiplin akuntansi, ilmu sosial dengan filsafat; sesuatu yang menurut Dyckman *et al.* (1978) termasuk jarang diperhatikan oleh para peneliti akuntansi (Hopper & Powell, 1985, p. 430).

Roslender (1992) meneruskan apa yang telah dirintis oleh Burrell dan Morgan (1979), yakni dengan menulis buku yang secara khusus membahas akuntansi modern dilihat dari sudut pandang sosiologi. Meskipun berbeda dalam cara

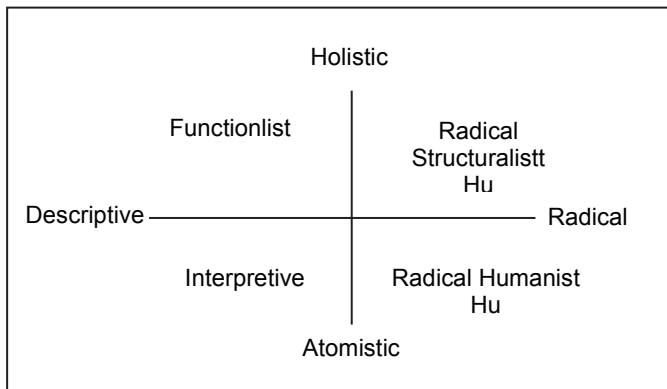
melakukan kategorisasi perspektif sosiologisnya, terutama dalam penggunaan istilah untuk dasar pembedaannya, serta dalam peletakan sumbu kontinum yang berakibat pada perbedaan letak kuadran yang merepresentasikan perspektif sosiologisnya, namun bisa dikatakan bahwa upaya pengkategorisasian perspektif sosiologis model Roslender ini sama. Kedua taksonomi tersebut juga serupa dalam hal sama-sama menggunakan pendekatan *bipolar continuum* untuk dua hal yang ingin dijadikan dasar pengkategorian. Model Kuadran Burrell dan Morgan (1979) dibangun di atas dua dimensi independen yang diletakkan berdasarkan asumsi atas karakter hakikat dari ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat. Selanjutnya, dalam dimensi ilmu pengeta-

huan sosial Burrell dan Morgan (1979) membagi ke dalam empat elemen yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yaitu elemen ontologi, elemen epistemologi, elemen hakikat dan karakter dasar manusia, serta yang terakhir, elemen *methodology*. Akhirnya keempat elemen tersebut oleh Burrell dan Morgan (1979) digabungkan dengan polaritas dimensi realitas sosial, pengetahuan dan perilaku manusia yang subyektif-obyektif sehingga perpotongannya membentuk kuadran yang merepresentasikan perspektif atau paradigma sosiologi (lihat gambar 1), yaitu *functionalism*, *interpretive*, *radical humanist*, dan *radical structuralist*.

Untuk lebih jelasnya, dua model taxonomi perspektif sosiologi tersebut disajikan secara skematik sebagai berikut:



Gambar 1 Taxonomi Perspektif Sosiologi dalam Analisa Organisasi Model Burrell dan Morgan (1979)



Gambar 2 Taxonomi Perspektif Sosiologi dalam Analisa Organisasi Model Roslender (1992)

Djamhuri,
 Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi

Hopper dan Powell (1985) mencoba mengembangkan sendiri pengklasifikasian perspektif sosiologis untuk mempelajari masalah organisasi. Berbeda dengan kedua taxonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, model taxonomi perspektif sosiologi dalam mengkaji akuntansi yang dikembangkan Hopper dan Powell (1985) hanya mengenal tiga perspektif, yakni positif, interpretif, dan kritis. Jika pemetaan dilakukan menggunakan model Burrell dan Morgan (1979), perspektif kritis yang dimaksud oleh Hopper dan Powell (1985) terletak di dua kuadran sebelah atas sekaligus. Ini berarti perspektif kritis memiliki ciri utama yang memandang masyarakat sebagai suatu entitas yang tidak teratur (sama seperti Burrell dan Morgan, mereka menggunakan istilah *radical*) dan sekaligus mampu mengakomodasi cara pandang yang berbeda, dari yang obyektif sampai kepada cara pandang yang subyektif. Akhir-akhir ini, selaras dengan makin berkembangnya ketidakpuasan masyarakat ilmiah maupun awam atas *modernism* yang dipandang sepenuhnya mewakili perspektif keilmuan *positivist*, juga telah berkembang perspektif *postmodernism* sebagai anti tesis terhadap modernisme. Ini belum termasuk perspektif yang secara khusus diperjuangkan sebagian besarnya oleh pemikir-pemikir wanita untuk mendapatkan keadilan gender yang muncul dalam suatu gerakan yang mereka namai *feminism*. Sebagai akibat begitu banyaknya variasi pemikiran dalam sosiologi dengan kadar perbedaan yang cukup signifikan, sosiolog atau mereka yang mempelajari sosiologi dengan baik, tampak cenderung lebih mudah melakukan pertukaran

gagasan keilmuan secara terbuka (*opened exchange of scientific ideas*) mengenai suatu obyek kajian yang diminati dibandingkan para akademisi akuntansi pada umumnya. Pertanyaan kita, barangkali, bagaimana kita semestinya menyikapi perkembangan keilmuan tersebut?.

Dengan segala argumentasinya, boleh jadi para akademisi akuntansi tidak memiliki keberatan yang berarti atas apa yang disarankan oleh Jensen (1983), karena memang tempat di mana akuntansi diterapkan adalah organisasi, sehingga pengabaian yang dilakukan oleh disiplin akuntansi atas relevansi teori organisasi dan perkembangannya merupakan suatu yang akan merugikan disiplin akuntansi sendiri. Yang terasa relatif lebih sulit adalah menyadarkan mereka yang selama ini mengikuti cara pandang konvensional bahwa kajian-kajian organisasi dari mana sebageaian besar teori organisasi yang selama ini mereka adopsi ke dalam wilayah disiplin akuntansi, terutama akuntansi manajemen, **ternyata** berasal dari kajian organisasi dalam ilmu sosiologi, tepatnya cabang sosiologi organisasi (*organization studies*). Logika sederhananya, jika ilmu sosiologinya sebagai disiplin induk memiliki banyak perspektif atau cara pandang ilmiah atas suatu masalah, maka sangat wajar pula jika kajian atas organisasinya juga memiliki banyak perspektif pemikiran. Implikasi lanjutannya, mudah diduga, senang atau tidak, kajian akuntansi sebagai bagian tidak terpisah dari kajian organisasi akan menerima dampaknya secara langsung, yaitu terseret ke dalam arus *multi-perspectives* atau *multi-paradigms*.

Kondisi seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar

biasa dan hanya terjadi di wilayah keilmuan akuntansi, melainkan kondisi yang sangat lazim dalam perkembangan dunia keilmuan secara umum, yaitu saat induk dari suatu disiplin mengalami perubahan maka cabang-cabang disiplin tersebut atau teknologi yang mendasarkan pada disiplin tersebut akan ikut mengalami perubahan. Karena perubahan yang terjadi bukan hal yang luar biasa dan *abnormal*, maka semestinya harus disikapi dengan sikap biasa, tidak perlu secara *extra ordinary* (luar biasa). Perubahan serupa ini saat ini tengah terjadi dan secara alamiah akan terus terjadi dalam disiplin apapun. Pada taraf tertentu bahkan perkembangan seperti ini, akan menimbulkan apa yang kita kenal dengan kemunculan ilmu-ilmu baru sebagai akibat proses hibrida (penggabungan atau persilangan) antara satu disiplin dengan disiplin lain, lihatlah misalnya beberapa contoh berikut: *biotechnology*, *sociopsychology*, *astrophysics*, *economical geography*, *informatics* dan sebagainya.

Gagasan akuntansi sebagai suatu *multiparadigmatic science* bukanlah gagasan yang baru, bahkan juga bukan gagasan yang saat ini terbatas masih berada di ranah sosiologi yang – paling tidak untuk sebagian besar kalangan akuntansi, baik yang akademisi, apalagi yang praktisi – masih dipandang asing dibandingkan ekonomi atau psikologi. Kesadaran mengenai kenyataan ini telah dimiliki oleh kalangan akuntan akademisi sendiri sejak lama. Mengacu kepada artikel Anthony Hopwood yang muncul *The Accounting Review* Volume 85 Issue No. 2 dengan judul *Whither Accounting Research ?* (Hopwood, 2007), ide tersebut bahkan telah

bersemai di *Accounting Department* di Chicago University di akhir tahun 1960an, yakni saat sederet nama yang di kemudian harinya, menjadi akademisi akuntansi terkemuka karena karya-karya monumentalnya masih menjadi mahasiswa doktoral seperti Joel Demski, Philip Brown, Ray Ball, Ross Watts, Bill Beaver, George Stigler, Merton Miller, Michael Jensen, ekonom *positivist* terkenal sekaligus peraih hadiah Nobel – Milton Friedman, serta Anthony Hopwood sendiri. Saat itu, masih menurut Hopwood (2007), kesadaran bahwa pemahaman atas akuntansi sedang berubah dan memerlukan upaya-upaya *interdisciplinary studies* tidak saja mulai dirasakan bahkan mulai secara sistematis dicoba lembaga dalam penelitian-penelitian doktoral akuntansi di Chicago University, padahal – harap diketahui saja – saat itu juga, baru pertama kalinya tradisi *empirical research in accounting* berhasil diseminarkan melalui suatu *conference* yang diselenggarakan oleh *Journal of Accounting Research*.

Melalui pengungkapan fakta historis ini, ingin ditegaskan di sini bahwa akuntansi adalah *multiple paradigm science* dan bukan *single paradigm science*. Meskipun kenyataan ini belum banyak disadari di kalangan akuntan di Indonesia, namun keyakinan ini penting secara akademik. Implikasinya sangat terasa pada berbagai pendekatan penelitian yang dilakukan di berbagai program doktor akuntansi di tanah air yang sangat mempertahankan *ortodoxy* dengan menutup secara rapat semua kemungkinan *interdisciplinary studies* atau *multiparadigmatic approaches on accounting*. Padahal, ilmu pengetahuan sangat

Djamhuri,
Ilmu
Pengetahuan
Sosial Dan
Berbagai
Paradigma
Dalam Kajian
Akuntansi

cepat sekali mengalami perubahan sebagaimana digambarkan oleh Hopwood (2007, pp. 1365-1366) dengan sangat tepat sekali sebagai berikut:

*“Knowledge almost literally was moving before your very eyes. Indeed there was a quite explicit awareness that **understanding were in the process of changing**, an impression that was reinforced by the fact that **you could still experience both the old and the new knowledges in both accounting and finance**”* (cetak tebal tambahan dari penulis).

Namun agaknya sudah menjadi hukum alam bahwa mengeksplorasi sesuatu, *termasuk* obyek ilmiah, dengan cara yang baru terbukti tidak selamanya mudah. Jika tidak begitu, pasti tidak akan dijumpai pernyataan pendek George Sarton di awal tulisan ini. Tentang betapa sulitnya mereka yang memiliki keberanian untuk melakukannya, bisa disimak dari kisah tragis yang dialami oleh Ray Ball dan Philip Brown. Untuk akademisi akuntansi di Indonesia, khususnya yang menekuni akuntansi keuangan dan pasar modal, kedua akademisi akuntansi ini bukan merupakan orang asing. Karya *seminal* mereka di tahun 1968 yang berjudul *An empirical evaluation of accounting income numbers*, yang bahkan menjadi salah satu “kitab suci” untuk para peneliti *positivist* di bidang akuntansi di Indonesia saat ini, pada awalnya ditolak diterbitkan oleh editor *The Accounting Review* (Hopwood, 2007, p. 1367) karena editor jurnal tersebut menganggap “it was not accounting”. Untungnya editor *Journal of Accounting*

Research, sebuah jurnal ilmiah bidang akuntansi yang diterbitkan dari kota Chicago berani melawan arus untuk menerbitkan tulisan mereka pada volume keenamnya (1968) untuk edisi *autumn*. Jika tidak ada keberanian seperti yang ditunjukkan oleh para editor *Journal of Accounting Research*, mungkin kajian atau penelitian bidang akuntansi keuangan dan pasar modal tidak akan mengalami perkembangan pesat seperti saat ini. Sayangnya, justeru dalam perkembangannya kini, *Journal of Accounting Research* berubah arah dan malahan menjadi salah satu pagar pelindung terkuat arus pemikiran konvensional di bidang akuntansi.

Menariknya, Hopwood (2007) menambahkan, bahwa hampir semua perubahan pola pemikiran atau cara pandang ilmiah selalu dimulai oleh para mahasiswa tingkat doktoral yang dibantu oleh para *academic advisor* mereka yang *opened mind*. Di dunia pendidikan tinggi akuntansi di USA, perkembangan tersebut terjadi di banyak tempat selain di Chicago University, seperti di Berkeley University, Carnegie Mellon University, serta Minnesota University. Namun, entah mengapa, hal yang sama tidak terjadi di Columbia University, harvard University, Standford University, serta Wharton School of Management (Hopwood, 2007).

Jika dilihat dalam perspektif keilmuan, agaknya kita perlu memberi catatan apresiasi secara khusus dengan apa yang terjadi di Chicago University. Mengacu kepada *Official Homepage of the University of Chicago* (<http://homepage.newschool.edu/het//schools/chicago.htm>), universitas ini telah menghasilkan banyak sekali peraih

hadiah Nobel seperti Milton Friedman, Schutz, Stigler, Coase, Becker, Miller, Fogel, Lucas, Simon, Buchanan, Markowitz, dan juga Scholes. Hebatnya, meski mazhab pemikiran ekonomi atau sosiologi yang dikembangkannya sangat variatif, dari sangat *classical*, *neo-classical*, bahkan sampai ke yang *institutional*, namun mereka setia mempertahankan apa yang kini dunia mengenalnya sebagai *The Chicago School*. Dalam ranah akuntansi, popularitas Watts dan Zimmerman dengan karya monumentalnya "*Positive Accounting Theory*" yang saat itu mewakili Rochester School, sebenarnya juga tidak bisa lepas dari pengaruh kuat *The Chicago School* ini.

Bagaimana perkembangan *multiparadigmatic approaches in accounting* selanjutnya? Sebagai suatu gagasan pemikiran, *multiple perspectives in accounting*, *multiparadigmatic approaches in accounting*, *interdisciplinary accounting studies*, atau apapun sebutannya, meskipun telah dan terus "dibonsai" perkembangannya dengan berbagai cara oleh mereka yang menolaknya, bahkan sejak awal pertumbuhannya, terbukti tidak mati dan bahkan mengalami perkembangan yang makin signifikan. Hal ini memperkuat kenyataan bahwa, seperti kata banyak orang bijak, "mengubur pemahaman atau cara berpikir, apalagi yang sama-sama ilmiah, sebagaimana juga mengembangkannya saat hal itu masih baru, sering kali sama sulitnya". Buku karya Anthony Hopwood tahun 1974 (atau tahun 1976 untuk edisi Amerika) yang berjudul *Accounting and Human Behaviour* mungkin jika dilihat saat ini adalah sebuah buku yang tidak luar biasa. Namun pada saat terbitnya, bagian in-

troductio**n** buku itu, yang ditulis oleh Bryan Casberg dari University of Manchester (Hopwood, 1976) mengungkapkan secara jujur bahwa kajian aspek keperilakuan dalam bidang akuntansi merupakan hal yang baru. Alasannya sederhana, katanya "*It is an area in which measurements and predictions are particularly difficult* (penebalan ditambahkan penulis). *However, it is also an area which holds the promise of progress* (penebalan ditambahkan penulis) *of dramatic practical importance*" (Hopwood, 1976). Prediksi Casberg tersebut tampaknya benar. Pertama, *Accounting, Organizations and Society* (AOS), sebuah jurnal *multiparadigm on accounting* terbit untuk pertama kalinya di tahun 1976. Jika diteliti dari artikel yang dimuat di dalamnya, jumlah tulisan tentang keperilakuan tampak lebih dominan dibandingkan bidang seperti akuntansi keuangan atau pasar modal. Relevansinya tampak nyata pada perkembangan yang lebih kentara di bidang akuntansi manajemen dan sistem informasi yang mencakup kajian seperti *Budgeting*, *Management Control Systems*, *Accounting Control*, *Performance Evaluation*, *Information Systems* dan sebagainya. Menyusul AOS, di tahun 1990 Elsevier juga menerbitkan untuk pertama kalinya sebuah jurnal baru yang mencoba mewedahi kajian-kajian akuntansi yang dilakukan dengan sudut pandang *multiple-perspectives*, yaitu *Critical Perspectives on Accounting*. Untuk kontek perakuntansian di Indonesia, Jurnal Akuntansi Multiparadigma yang diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya di bulan April 2010 boleh jadi merupakan jurnal akuntansi pertama di Indone-

Djamhuri,
*Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi*

sia yang berani memproklamasikan diri sebagai *outlet* untuk menampung hasil kajian akuntansi yang berasal dari berbagai perspektif pemikiran ilmiah.

Pandangan Nonkonvensional Dalam Kajian Akuntansi

Tulisan ini sengaja menggunakan istilah pandangan nonkonvensional dalam kajian akuntansi untuk menunjukkan suatu cara pandang dalam melaksanakan atau melihat hasil kajian akuntansi yang bersifat *multiperspectives* atau *multiparadigm*. Pada level tertentu, cara pandang ini juga bisa saling dipertukarkan dengan cara pandang dalam melaksanakan kajian atau dalam melihat hasil kajian akuntansi yang bersifat *multidisciplinary* atau *interdisciplinary*. Namun demikian, perlu diberikan catatan khusus di sini, bahwa penggunaan kata “multi” atau “inter” yang dihubungkan dengan *perspective*, *paradigm* atau *disciplinary* tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunjukkan model kajian atas masalah akuntansi yang sekaligus mengkombinasikan perspektif-perspektif keilmuan yang ada menjadi satu, atau apa yang saat ini populer dengan sebutan *mixed methods research*. Model riset *mixed methods* hanyalah salah satu contoh yang mungkin bisa diwujudkan melalui cara pandang yang nonkonvensional ini. Sesuai dengan istilah-istilah yang digunakan sebagai padanan dari cara pandang nonkonvensional, istilah nonkonvensional lebih menekankan kepada cara pandang yang tidak monolitik dan tidak didasarkan atas logika dan pemikiran yang mengedepankan oposisi biner. Dengan demikian, cara pandang ini merupakan cara pandang dalam melaksanakan

kajian atau atas hasil kajian akuntansi yang bisa menganut paradigma apapun yang lazim dijumpai dalam ranah ilmu sosial yang pada saat yang sama memberikan ruang yang memadai terhadap kemungkinan berlakunya perspektif atau paradigma yang lain dalam melihat masalah yang dihadapi. Dengan pengertian seperti ini, suatu kajian atas masalah akuntansi yang dilakukan dengan mengikuti paradigma *interpretivist* atau bahkan *functionalist* akan tetap tergolong sebagai kajian multiparadigma (nonkonvensional) sepanjang peneliti yang melakukannya berkeyakinan bahwa kajian mengenai hal tersebut, pada dasarnya dapat pula dilakukan dengan paradigma atau perspektif keilmuan lainnya. Dengan kata lain, kajian akuntansi tersebut dari awalnya telah diletakkan pada tataran yang tetap terbuka atas kemungkinan diterapkannya paradigma lain. Bagian berikut akan mencoba membahas secara singkat masing-masing perspektif keilmuan tersebut. Sedikit perkecualian akan diberikan kepada perspektif keilmuan *postive* yang menurut Burrell dan Morgan (1979) merupakan salah satu unsur filosofis keilmuan terpenting yang mewarnai paradigma *functionalism*, yaitu karena *positivistic perspective of science* sudah cukup detail dibahas di bagian sebelumnya bersamaan dengan penjelasan tentang cara pandang konvensional atas akuntansi, maka perspektif keilmuan tersebut tidak akan dibahas lagi secara terinci kecuali dua hal, yaitu sejarah singkat pertumbuhannya, serta variasi-variasi yang saat ini ada pada perspektif keilmuan tersebut.

Sejarah Perkembangan Positivisme

Dari sisi histori, *Positivistic perspective of science* lahir sebagai reaksi atas pola berpikir masyarakat yang – menurut Comte (Smith, 1998) – masih didominasi oleh konsep-konsep tradisional yang penuh *klenik* (*superstitions*), ortodoksi agama yang tidak rasional, serta filsafat metafisika yang meski lebih nalar terbukti tidak produktif dan ampuh untuk melawan kekuasaan gereja yang begitu dominan dan membelenggu. Dalam kondisi seperti ini, problema-problema sosial, bahkan juga yang berkaitan dengan fenomena alam diselesaikan melalui tradisi atau agama. Paling tidak untuk ukuran para ilmuwan Eropa yang memelopornya seperti August Comte, Herbert Spencer dan sampai batas tertentu juga Emile Durkheim (Smith, 1998), masyarakat Eropa yang ada (dengan seluruh karakteristik ortodoksi agama maupun tradisi yang hidup saat itu), dipandang sangat *mythical*, artinya penuh dengan hal-hal yang mistis yang tidak memiliki pijakan fakta (*factual*). Pada sisi lainnya, mereka menyaksikan betapa kekuasaan Gereja begitu besarnya sehingga solusi akhir dari hampir semua persoalan kemasyarakatan dicoba diselesaikan hanya melalui *the divine command* (firman atau wahyu) yang mereka klaim paling otoritatif. Oleh sebab itu, masih menurut Comte (Smith, 1998), masyarakat dipenjara oleh mitos-mitos yang tidak saja tidak faktual, bahkan juga sangat tidak rasional. Ditambah dengan kondisi kerusakan masyarakat Eropa saat itu, salah satunya disimbolkan melalui terjadinya Revolusi Perancis (1789), kondisi masyarakat berada dalam suasana “*disorder*”.

Dari latar belakang sejarah seperti ini, tampak bahwa kemunculan *positivism* lebih sebagai upaya mengubah dan memberi dasar pijakan terhadap ilmu pengetahuan dari yang sebelumnya tidak faktual dan tidak rasional menjadi suatu ilmu pengetahuan yang berbasis fakta maupun rasio (logika). Harapannya, ilmu pengetahuan baru yang menggabungkan antara cara berpikir induktif dan deduktif ini akan mampu menjadi sarana peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama melalui upaya sekularisasi kehidupannya secara terus-menerus sehingga masyarakat terbebas dari tradisi atau agama yang penuh dengan mitos. Menurut Comte, agama sebagai sumber acuan pemberian solusi atas berbagai persoalan dunia (*worldly problems*) seharusnya bisa digantikan perannya oleh ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, temuan-temuan dalam ilmu kealaman pada era tersebut seperti temuan Galileo Galilei tentang pusat dari *solar system* yang terbukti matahari (*helio centris*), dan bukan bumi (*geo centris*), meskipun harus dibayar oleh penemunya dengan hukuman mati oleh Gereja, jelas ikut mejadi pendorong yang sangat kuat bagi semangat Comte yang ingin melahirkan ilmu pengetahuan sosial yang sama kokohnya dengan ilmu pengetahuan kealaman. Oleh karena itu tidak mengherankan, jika nama ilmu pengetahuan sosial yang digagas oleh Comte yang menjadi tonggak ilmu sosial yang positivistik ini adalah “*social physics*” atau ilmu fisika sosial (Smith, 1998, p. 79).

Secara ringkas Comte berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dicirikan oleh perubahan dan kemajuan (*change and de-*

Djamhuri,
 Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi

velopment). Tradisi, religi dan filsafat metafisika, menurut keyakinannya, terbukti tidak mampu membawa perubahan dan kemajuan. Ilmu pengetahuan, terutama yang telah ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan alam, harus mampu berperan mengisi kekosongan sumber acuan atas tatanan masyarakat yang saat itu dianggap telah mengalami keruntuhan (*collapse*) agar masyarakat bisa kembali ke kondisi yang teratur (*ordered*). Menurut Comte, tahapan perkembangan pengetahuan (*knowledge*) manusia bisa dipetakan, yaitu dari pengetahuan yang bersifat fiktif (tidak berbasis kenyataan), ke arah tahap berikutnya berupa pengetahuan yang berbasis metafisika (*metaphysics*). Setelah itu perkembangan pengetahuan manusia akan memasuki tahap ke tiga, yaitu tahap ilmu pengetahuan (*science*). Lebih lanjut, Comte meyakini bahwa setiap tahapan pengetahuan manusia tersebut pada dasarnya didasarkan pada dan merupakan refleksi dari kepercayaan masyarakat yang hidup pada zaman itu (Smith, 1998, p. 79). Tahap pengetahuan masyarakat yang fiktif, sebagai contoh, merefleksikan kepercayaan masyarakat yang berupa keyakinan (agama) dan tradisi; sementara tahap pengetahuan masyarakat yang bersifat metafisik didasarkan pada filsafat. Hanya tahap ilmu pengetahuan sajalah, yang mendasarkan diri pada kepercayaan atas logika rasional.

Dilihat dari formatnya sebagaimana yang kita kenal saat ini, *positivistic science* yang mulai berkembang di awal tahun 1800an ini, terutama dalam ilmu sosial, pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang evolutif

dengan membawa serta perbedaan dalam karakteristiknya. Dalam ranah Ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan sosial positivistik awal (*Early Positivist science*) adalah ilmu pengetahuan sosial "Comtian" yang sangat mengagungkan segala sesuatu yang berasal dari ilmu pengetahuan kealaman termasuk dalam filosofi dasar serta metodologinya. Varian dari *Comtian social science* muncul setelah lingkaran Wina (*Viena Circle*) dengan tokoh-tokohnya seperti Ayer dan Rudolf Carnap di awal tahun 1900an (Smith, 1998) memperkenalkan apa yang mereka sebut sebagai *logical positivism*. *Positivist social science* ala Lingkaran Wina ini merupakan hasil purifikasi atau pemurnian terhadap *Comtian Positivist social science* yang menurut para tokoh Lingkaran Wina tergolong kurang tegas dalam menolak kehadiran unsur-unsur metafisika. Bagi pengikut Lingkaran Wina, ilmu pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan sosial sekalipun, harus benar-benar terbebas dari unsur-unsur metafisika, caranya adalah dengan sepenuhnya hanya menyandarkan kepada penginderaan (*sensing*). Oleh sebab itu gerakan Lingkaran Wina dalam memberi bentuk ilmu sosial ini sering disebut juga sebagai *physicalism* untuk menunjukkan betapa kuatnya upaya mereka melakukan adopsi berbagai konsep dan metodologi ilmu fisika ke dalam ilmu sosial. Kerasnya upaya purifikasi ilmu sosial yang dilakukan oleh Lingkaran Wina ini tidak bisa dilepaskan dari gagasan Bertrand Russell dalam *Principia Mathematica* serta karya Wigenstein "The Philosophy of Language". Sembari mengandalkan kepada penginderaan yang murni, ilmu sosial positivistik model Ling-

karan Wina ini memanfaatkan konsep bahasa *Wiggensteinian* yang mencoba membedakan antara pernyataan ilmiah yang bersifat analitis (*analytical*) dan sintesis (*synthesis*).

Varian kedua dari *Comtian Social Science*, adalah apa yang kemudian dikenal dengan *Standard Positivist of Account* yang muncul tahun 1950an dengan tokoh utamanya Carl Hempel (Smith, 1998). Apa yang ingin diusung oleh Hempel sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang ada pada upaya purifikasi, yang dilakukan oleh Lingkaran Wina, terutama dalam komitmennya mengenai pembebasan ilmu pengetahuan dari metafisika dan hal-hal yang bersifat spekulatif. Yang membedakannya, Hempel memberi tekanan tambahan pada pentingnya *value freedom* serta prediksi. Format terakhir ini juga terpengaruh oleh gagasan *falsificationism* yang dikembangkan oleh Karl Popper. Saat ini apa yang kita sebut dengan *positivism*, dengan demikian, lebih mengacu kepada *Hempelian* dan *Popperian positivism*. Karakteristik positivisme yang dipaparkan di bagian depan tulisan ini adalah karakteristik umum yang bisa berlaku baik bagi *Comtian*, *Venenean*, maupun *Popperian positivistic Social Science*. Apa yang menarik dilihat dari bagaimana *positivistic social science* mengalami perkembangan adalah, pertama bahwa upaya manusia untuk memperoleh sumber acuan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan hidupnya bersifat universal dan terus-menerus terjadi sepanjang zaman. Pada saat temuan-temuan besar dalam ilmu kealaman dihasilkan, untuk pertama kalinya seperti temuan Galileo Galilei tentang pusat dari *solar system*, di belahan bumi lain-

nya di luar Eropa tentu juga sedang terjadi upaya yang sama, namun dengan kadar dan modus yang – boleh jadi – berbeda sehingga hasil akhirnya juga berbeda. Kenyataan inilah yang menjadi argumen bagi sebagian ilmuwan untuk meyakini bahwa ilmu pengetahuan yang sepenuhnya *nomothetical* sehingga teori-teori yang dihasilkannya sepenuhnya berlaku universal adalah suatu kemustahilan. Sebagai ilustrasi saja, jika kita di sini, di Indonesia, membicarakan ilmu kedokteran atau teknologi penyembuhan (*healing technology*), maka yang kita maksudkan dan ada dalam benak kita adalah ilmu kedokteran barat dengan segala asumsi dasar, pendekatan, dan metoda penyembuhannya; padahal sampai hari ini di bagian dunia lain, di Cina, terdapat *healing technology* lain yang juga sama-sama berlaku yang memiliki asumsi dasar, pendekatan, maupun metoda penyembuhan yang berbeda dengan apa yang berlaku di dunia barat maupun Indonesia. Teknologi penyembuhan Cina yang berbasiskan asumsi dasar keseimbangan antara Yin dan Yang bahkan kini makin maju perkembangannya.

Interpretivism

Jika definisi dimaknai sebagai suatu pernyataan ilmiah yang harus mampu memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang sesuatu, maka terbukti bahwa istilah *interpretivism* termasuk ke dalam istilah yang sulit didefinisikan. Definisi *interpretivism* yang dikemukakan oleh Wai Fong Chua (Chua, 1988) berikut ini boleh jadi hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah memiliki latar belakang pendidikan filsafat atau memiliki minat

Djamhuri,
 Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi

yang tinggi dalam mempelajari filsafat, terutama filsafat barat. Menurut Chua (1988), *Interpretive perspective* merujuk kepada tradisi intelektual yang berakar pada gagasan para filosof idealis Jerman seperti Emanuel Kant, Hegel, Dilthey, Weber, Husserl, Heidegger, Schutz, Gadamer, dan Habermas. Bagi mereka yang masih awam atau kurang akrab dengan filsafat, persoalan utama yang melekat pada definisi seperti ini adalah masih belum terungkapnya secara jelas karakteristik yang dimiliki oleh pemikiran Kant, Hegel, Dilthey, Weber, Husserl, Heidegger, Schutz, Gadamer, dan Habermas. Lebih menyulitkan lagi jika ternyata masing-masing filsuf tersebut memiliki karya filsafat yang lebih dari satu yang berbeda secara signifikan, paling tidak masih diperlukan penjelasan kepada karya filsafat yang mana definisi tersebut mengacu. Oleh sebab itu tulisan ini lebih memilih menjelaskan karakteristik *interpretivism* daripada mendefinisikannya.

Tentang karakteristik sosiologi interpretive ini, Chua (1988, p. 60), menulis sebagai berikut:

“This philosophical tradition focuses on the constructive and interpretive action of people, whether it be their ability to organise sense data through forms of a priori knowledge (Kantian transcendentalism), or as reflected in the essentials of their experiences (Husserlian phenomenology). In sociology, the tradition has given birth to a confusing number of descendants, with bewildering names such as “existential phenomenology”, “cognitive sociology”, “interactionism” and “ethnomethodology””

Dengan mengacu kepada

karakteristik *interpretivism* yang diberikan Chua (1988, p. 60) tersebut, terdapat poin penting yang bisa diidentifikasi, yaitu bahwa tradisi interpretivisme ini menekankan pada upaya mengonstruksi (*constructivis*) dan menafsirkan tindakan masyarakat, baik melalui pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya maupun sebagaimana yang direfleksikan melalui pengalaman mereka (aktor atau pelaku) yang terlibat dalam tindakan sosial. Oleh sebab itu, tujuan sosiologi *interpretive* adalah menemukan makna tersembunyi yang ada di balik tindakan-tindakan sosial sebagaimana dipahami oleh para pelaku (aktor yang diteliti) melalui suatu upaya pemahaman yang baik. Karena makna bisa terbentuk melalui interaksi sosial sehingga peneliti interpretif memberi ruang bagi berlakunya subyektivitas dialogis antara peneliti dengan pihak yang diteliti. Dengan ditemukannya makna tindakan sosial tersebut, sosiolog *interpretive* berusaha untuk menghadirkan kembali (merekonstruksi) bangun struktur sosial dalam mana interaksi sosial berlangsung dengan seluruh makna yang dipahami oleh semua aktor yang melakukannya. Dari kutipan Chua (1988) tersebut, kita juga bisa memahami bahwa sosiologi *interpretive* sangat menekankan arti pentingnya makna yang berasal dari upaya deduktif (*a priori*), meskipun sebagai suatu sosiologi yang berkarakter pokok “*every day life*”, *interpretive sociology* juga sosiologi yang – meski sedikit – menghargai *knowledge* yang bersifat induktif (*posteriori*) yang berasal dari pengalaman para pelaku. Ciri lain yang juga cukup penting dari perspektif ini adalah sudut pandangnya

atas ilmu-ilmu sosial yang *nominalist, anti-positivist, voluntarist, dan ideographic* (Burrell & Morgan, 1979). Ini bermakna bahwa dunia atau fenomena sosial diyakini sebagai rangkaian proses sosial yang muncul seketika (*emergent*) sebagai akibat interaksi (keterlibatan) para aktor atau pelakunya. Oleh sebab itu, perspektif sosiologi ini mempercayai bahwa realitas sosial sesungguhnya tidak lebih hanya suatu jaringan asumsi (persepsi) yang telah diterima bersama (*shared*) oleh para pelaku secara *intersubjective* sehingga memberi suatu makna yang disepakati. Dalam pandangan perspektif ini, obyektivitas sejati adalah suatu kemustahilan. Obyektivitas, jika memang ada, tak lebih dari *intersubjectivity*, suatu makna kesepakatan yang berasal dari interaksi antar subyek yang subyektif. Beberapa pendekatan sosiologi termasuk dalam domain perspektif interpretivism ini, seperti *interactionism (symbolic interactionism), phenomenology, dramaturgy, ethnomethodology, semiotics* dan *hermeneutics*.

Symbolic Interactionism merupakan sosiologi yang meyakini bahwa realitas sosial tidak berada di luar kesadaran individual manusia sebagaimana diyakini oleh sosiologi *functionalism*, namun justeru terbentuk (*constructed*) melalui interaksi yang terjadi antar individu dalam masyarakat. Dengan kata lain sosiologi ini adalah sosiologi yang bersifat *constructivist*. Oleh sebab itu, dalam pandangan sosiologi ini manusia adalah entitas atau pribadi yang aktif dan memiliki kesadaran (*consciousness*) serta kemauan bebas (*free will*), bahkan melalui interaksinya dengan pihak lain memiliki kemampuan

untuk mewarnai karakteristik dan mengubah struktur yang ada, bukan mahluk terkungkung yang selalu mengikuti dan ditentukan kemauannya oleh struktur yang melingkupinya. Untuk diketahui, meskipun masing-masing pendekatan sosiologis lainnya dalam rumpun sosiologi interpretif memiliki perbedaan dengan *symbolic interactionism*, namun di samping karakteristik umum pemaknaan dalam *interpretive sociology* seluruhnya berlaku bagi masing-masing pendekatan tersebut, perbedaan yang ada juga relatif tidak signifikan dan terutama hanya berkait dengan aspek-aspek teknis metodologis (*dramaturgi*), serta masalah ada tidaknya keterkaitan dengan soal budaya (*ethnography* dan *ethnomethodology*).

Dramaturgi. Dalam sosiologi *Dramaturgy* selalu dikaitkan dengan tokoh sosiologi Erving Goffman (Appelrouth dan Edles, 2007). Bagi mereka yang masih awal mempelajari sosiologi, boleh jadi istilah dramaturgi lebih membingungkan ketimbang memberi kejelasan mengenai apa yang ingin disampaikan melalui istilah tersebut, sebab utamanya bisa diduga, masuknya kata drama dalam *dramaturgy*. Erving Goffman sengaja menggunakan istilah dramaturgi dalam sosiologi yang dikembangkannya untuk memberikan tekanan bahwa interaksi sosial pada dasarnya dapat dianalisis menggunakan analogi *theatrical* suatu pertunjukan, yakni sebuah drama. Gagasan yang diilhami banyak oleh filsafat bahasanya Kenneth Burke (1897-1993) yang meyakini bahwa bahasa pada dasarnya ungkapan simbolik suatu drama (Appelrouth & Edles, 2007) oleh Goffman dipakai untuk memahami interaksi sosial di

Djamhuri,
*Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi*

masyarakat, terutama dalam mencari makna yang ada, misalnya *motif tindakan* yang secara simbolik ditampakkan ke luar oleh para pelakunya namun tersembunyi karena dibungkus dalam bahasa yang acapkali bersifat retorik (seperti sebuah drama). Oleh sebab itu, bagi Goffman upaya untuk memahami makna interaksi sosial harus menggunakan analogi sebuah drama, misalnya kita harus memperhatikan hal-hal seperti panggung belakangnya (*backstage*), tempat para pemain drama mempersiapkan diri sehingga bisa diketahui hal-hal apa saja yang sebenarnya melatarbelakangi peristiwa sosial yang tengah kita amati. Selain, *backstage*, seting sosial atau kontek dimana peristiwa sosial terjadi juga merupakan hal lain yang menurut Goffman harus diperhatikan, disamping faktor-faktor seperti karakter para pemain, dan – jangan lupa – *audience*. Bagi Goffman, apa yang bisa disaksikan oleh *audience* dari sebuah drama hanyalah latar depannya (Goffman mengistilahkan sebagai “*front*”), padahal latar depan yang tampak ini (sebagaimana juga suatu permainan drama) hampir selalu telah merupakan produk suatu proses pelembagaan (*institutionalization*) sehingga cenderung sama karena telah mengalami standarisasi dan telah diterima sebagai suatu institusi (bisa jadi malah bagian dari budaya). Oleh karena itu, tugas sosiolog, menurutnya, adalah memaknai tindakan atau peristiwa sosial yang tampil retorik tersebut.

Sekadar untuk tidak terlampaui jauh dari masalah utama kita, yakni akuntansi, adalah sangat perlu bagi kita, para akuntan dan akademisi akuntansi, untuk memiliki kepekaan

(*sensitivity*) yang lebih baik sehingga mampu menangkap peristiwa sosial berupa penggunaan secara retorik konsep-konsep keilmuan akuntansi oleh para politisi maupun birokrat saat mereka mencoba meyakinkan publik (masyarakat) yang perlu mereka yakinkan, misalnya untuk kasus privatisasi BUMN, untuk kasus BLBI, kasus Bank Century dan sebagainya. Bukankah dalam kasus-kasus itu, yang digunakan untuk menjustifikasi tindakan politik pemerintah adalah konsep akuntansi seperti laba atau rugi, *cost (recovery cost)* dan sebagainya?. Tidak jarang penggunaan akuntansi secara retorik juga dilakukan oleh para akuntan sendiri untuk menyelamatkan profesinya. Pikirkanlah misalnya, seberapa besar sebenarnya tambahan manfaat yang akan diterima masyarakat banyak dengan menerapkan konsep *fair value* dan bukan lagi *historical cost*. Atau seberapa besar akualisasi akuntansi penganggaran dan akuntansi pemerintahan di Indonesia yang harus dilaksanakan dalam waktu yang begitu singkat?. Tentu kita tetap menyadari bahwa besaran manfaat (atau sebaliknya mudarat) yang akan diterima oleh para pengambil keputusan ekonomi akan sangat tergantung kepada seberapa kompleks situasi ekonomi yang dihadapi, serta seberapa canggih (*sophisticated*) model pengambilan keputusan yang dipakai untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing *decision maker*, artinya sangat relatif terhadap kontek (ruang dan waktu). Jika dalam kenyataan kita menjumpai ada penyeragaman mengenai penerapan *fair value*, misalnya, maka bukankah secara sosiologis kita perlu menelaahnya den-

gan menempatkan hal tersebut sebagai suatu drama. Pertanyaan relevannya, boleh jadi, siapakah pemain-pemainnya?; bagaimana karakter mereka?; dalam bentuk apa latar (panggung) depannya?; dan bagaimana konteksnya?. Dengan memahami itu semua, paling tidak menurut Goffman, kita akan bisa menjawab sebenarnya apa motivasi dasar yang melatarbelakangi penciptaan “pertunjukan” atau “lakon” tersebut dan kemana tujuan serta arah yang ingin dituju oleh para pencipta pertunjukan serta para aktornya.

Phenomenology. *Phenomenology* memiliki akar kata *phenomena* atau malahan *noumena*. Menurut Wikipedia (<http://en.wikipedia.org/wiki/Noumenon>), kata *noumena* berasal dari bahasa latin yang berarti suatu obyek atau kejadian yang hanya bisa ditangkap atau dipahami oleh pikiran manusia dan sama sekali bukan oleh atau melalui panca indera, sedangkan *phenomenon* (bentuk tunggalnya *phenomena*) menunjuk kepada hasil penampakan dari *noumena*. Dengan kata lain *phenomenon* adalah hasil tangkapan obyek tersebut melalui panca indera manusia, Sebagai suatu cabang filsafat sekaligus suatu pendekatan penelitian dalam rumpun perspektif *interpretive*, fenomenologi adalah cabang filsafat dan pendekatan penelitian yang mencoba meng gali makna atau anggapan-anggapan yang tersembunyi dan terkandung dalam *phenomena* tindakan sosial yang ada, Pendekatan ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh utamanya, Redmund Husserl, bertumpu pada keyakinan-keyakinan tertentu sebagai berikut: (1) bahwa pada dasarnya di dunia ini tidak ada subyek yang

sepenuhnya subyektif sebagaimana juga tidak ada obyek yang sepenuhnya obyektif, (2) obyek-obyek sosial yang diamati tidak memiliki ketampakan (penampilan) yang independen atau terlepas sama sekali dari subyek (orang) yang mempersepsikannya (Appelrouth dan Edles, 2007), Implikasinya mengarah kepada kesimpulan bahwa pengalaman manusia pada hakikatnya merupakan suatu dunia yang dipenuhi oleh obyek-obyek yang pada dirinya terdapat makna dan hubungan yang obyektif. Melalui pengarah an kesadaran kita yang tepat dan bersengaja, akan memungkinkan seseorang atau *phenomenolog* mampu merekonstruksi atau – istilahnya Husserl “*bracketing*” (Appelrouth dan Edles, 2007) – pandangan dasar yang dimiliki orang yang bersangkutan tentang dirinya, maupun tentang obyek-obyek dunia luarnya sehingga sekaligus mampu mengeksplorasi saling keterkaitan yang ada. Untuk memahami fenomena sosial, kata kuncinya, masih menurut Husserl, “*thinking as usual*” dalam kehidupan sehari-hari.

Pelanjut Husserl, Alfred Schutz memberikan tekanan lebih lanjut dari apa yang dikemukakan oleh Husserl. Menurut nya manusia pada dasarnya tidak mungkin mencerna pengalamannya sebagai suatu realitas yang obyektif, sebaliknya mereka malahan mencerna pengalaman atas dunianya sebagai suatu yang subyektif, yaitu sebagai rangkaian obyek yang saling terhubung dan mampu memberi makna (Appelrouth dan Edles, 2007). Oleh sebab itu, untuk bisa menjelaskan tentang suatu realitas, seseorang perlu memerhatikan struktur makna yang dipakainya dalam mem-

Djamhuri,
*Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi*

persepsikan realitas tersebut. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka menurut Husserl, terdapat struktur makna yang telah terbentuk melalui proses sosialisasi, yakni struktur makna yang telah terorganisir dengan baik. Struktur makna inilah yang dipakai oleh manusia dalam memaknai tindakan-tindakan dan peristiwa sosial yang ada di sekelilingnya. Struktur makna yang terorganisasi inilah yang sebenarnya mewujudkan sebagai “kebiasaan”. Tugas, kita sebagai peneliti fenomenologi, dengan demikian, adalah membuka makna sosiologis dari hal-hal yang masih terselubung dan tertutupi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal seperti ini hanya bisa kita lakukan, jika kita mampu menempatkan diri kita pada posisi pelaku tindakan sosial yang kita amati dan terus-menerus mencoba mengidentifikasi hubungan yang ada antara pengalaman kita dengan pengalaman para pelaku tindakan sosial itu sendiri. Di titik inilah sebenarnya para tokoh sosiologi fenomenologi seperti Husserl dan Schutz memiliki kesamaan pandangan atau prinsip yang selalu mereka terapkan dalam melihat realitas sosial, yakni “*intersubjectivity*”. Dengan menerapkan konsep *intersubjectivity* ini, mereka berusaha menginterpretasikan pengalaman kita dan pengalaman para pelaku tindakan atau peristiwa sosial yang diamati melalui simbol-simbol dan skema penafsiran (*interpretive schemes*) yang telah dimiliki bersama antara kita dan pelaku tindakan sosial.

Tradisi fenomenologis ini kemudian juga dilanjutkan oleh sosiolog-sosiolog lain seperti Peter Berger dan Thomas Luckmann (Appelrouth dan

Edles, 2007). Berger dan Luckman, misalnya, berpendapat bahwa “masyarakat (*society*) pada hakikatnya suatu bentukan manusia; masyarakat juga adalah suatu realitas sosial yang obyektif; dan manusia merupakan produk sosial” (Appelrouth dan Edles, 2007). Gagasan Berger dan Luckmann ini memperkuat apa yang sebelumnya dipahami sebagai gagasan *interactionism*, yakni antara seorang manusia dengan masyarakat yang melingkupinya. Dengan pemahaman seperti ini, Berger dan Luckmann lebih lanjut mengatakan bahwa masyarakat, termasuk suatu organisasi, pada hakikatnya merupakan suatu kondisi stabil dari suatu proses saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan yang melingkupinya yang diikat oleh pemahaman (cara pandang) dan nilai-nilai yang sama. Proses pembiasaan, menurut istilah yang mereka kemukakan “*habitualization*” telah memungkinkan terjadinya stabilitas secara temporer pemahaman dan nilai-nilai yang berasal dari individu-individu yang membentuk masyarakat. Dengan memberi ruang yang lebih luas, yakni kepada masyarakat yang di dalamnya terdapat lebih banyak variasi pemahaman dan tata nilai yang diyakini oleh para anggotanya, konsep *habitualization* diterapkan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat mengalami proses stabilisasinya. Proses ini mereka namakan sebagai *institutionalization* (Appelrouth dan Edles, 2007). Oleh karena itu, institusionalisasi melibatkan lebih banyak pihak yang memiliki lebih banyak corak pemahaman dan tata nilai, sehingga di dalamnya juga melibatkan lebih banyak proses seperti pengelompokan (*typification*), peny-

eragaman, tarik-ulur kepentingan dan sebagainya.

Jika sosiologi ini, coba diterapkan dalam melihat fenomena akuntansi, maka seorang peneliti fenomenologi misalnya, dapat mulai penelitiannya, dengan memandang bahwa akuntansi dalam organisasi adalah sebuah produk dari proses institusionalisasi. Sebagai produk institusionalisasi, akuntansi dalam organisasi (misalnya sistem informasi akuntansi dengan segala struktur, prosedur dan perangkatnya) pada taraf tertentu akan berpotensi dan mampu menciptakan kestabilan organisasi. Pertanyaan penelitian yang bisa dimunculkan misalnya adalah bagaimana proses stabilisasi tersebut berlangsung? Siapa saja yang berperan serta dalam proses menuju kestabilan tersebut? Siapa diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi sikap dan tindakan masing-masing pihak yang terlibat?. Secara ilmiah, untuk menganalisis dan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, beberapa teori sosiologi tertentu seperti teori Sosiologi Kelembagaan Baru (*New Institutional Sociology*) dan Teori Strukturasi (*Structuration Theory*) merupakan teori-teori yang cukup relevan untuk dipertimbangkan penggunaannya. Bagi mereka yang menekuni aspek managerial dan organisasi dari akuntansi, pertanyaan-pertanyaan tersebut masih mungkin untuk sekaligus dikaitkan dengan tema yang lebih besar seperti tema perubahan organisasi (*organizational change*).

Ethnomethodology. Merujuk kepada buku karya Karamjit S. Gill (1996) yang berjudul *Human machine symbiosis*, kamus Wikipedia mendefinisikan

ethnomethodology dengan cara sebagai berikut:

“Ethnomethodology is a method for understanding the social orders people use to make sense of the world through analyzing their accounts and descriptions of their day-to-day activities”.

Sederhananya, etnometodologi merupakan cara kajian secara sosiologis yang berusaha mendapatkan pemahaman tentang bagaimana suatu kelompok masyarakat atau anggota suatu budaya tertentu menggunakan atau menerapkan unsur-unsur budayanya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pengertian seperti ini, etnometodologi meletakkan tekanan pertanyaan utamanya bukan kepada **mengapa** suatu kelompok masyarakat berlaku atau menjalankan perilaku sosialnya dengan cara tertentu sebagaimana yang menjadi pusat perhatian *ethnography*, melainkan kepada **bagaimana** kelompok masyarakat yang sedang kita teliti melakukan atau mempraktikkan unsur-unsur budaya yang secara bersama-sama mereka miliki. Dengan kata lain, ilmuwan yang memilih pendekatan penelitian *ethnography* lebih tertarik untuk mengetahui, misalnya, apakah semua unsur budaya yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat diterapkan dengan cara yang sama secara otomatis, atau – sebaliknya – unsur-unsur itu sebenarnya diterapkan melalui proses negosiasi yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Dalam literatur ilmu sosiologi, pendekatan *Ethnomethodology* selalu dikaitkan dengan tokoh yang memperkenalkannya, yaitu Harold Gar-

Djamhuri,
 Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi

finkel (Appelrouth dan Edles, 2007). Dalam upaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana masyarakat mempraktikkan unsur budaya yang mereka miliki, Garfinkel bahkan dikenal melalui caranya yang – boleh jadi bagi kebanyakan orang – tidak lazim, yaitu melakukan percobaan dengan sengaja melanggar apa yang telah lazim diklaim sebagai kebiasaan atau tata aturan yang normal (*rule breaching*), misalnya saat berada di dalam lift mengarahkan wajah langsung ke wajah pengguna lift lain atau membelakangi pintu lift. Dia berkeyakinan bahwa dengan memerhatikan bagaimana reaksi yang muncul dari para pengguna lift, seorang *ethnomethodologist* akan bisa menjawab pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui pendekatan *ethnomethodology* ini, misalnya melalui penelusuran tentang alasan yang mendasari mengapa mereka (para pengguna lift lainnya) bereaksi seperti itu. Langkah selanjutnya yang juga sangat *critical* adalah saat peneliti harus mengamati tentang derajat penerimaan (atau juga sebaliknya, derajat penolakan) para anggota budaya tersebut terhadap perilaku menyimpang yang dipertontonkan oleh orang yang melanggar aturan tersebut. Derajat penolakan atau penerimaannya akan bisa diukur dari cara yang ditunjukkan oleh para pengguna lift lainnya dalam mereaksi pelanggaran kebiasaan mereka, misalnya tidak peduli, lemah (diam saja tapi menggerutu), mengingatkan dengan sopan, mengingatkan dengan *ketus*, memberontak secara spontan, atau bahkan menindak lanjuti dengan tindakan lain yang mengekspresikan ketidaksetujuan (protes kepada pihak lain yang punya otoritas

untuk mengatur penggunaan lift, misalnya) selepas peristiwa sosial tersebut terjadi. Tipologi reaksi tersebut pada dasarnya mampu memberikan petunjuk (*clues*) yang bermanfaat bagi seorang peneliti etnometodologi di dalam menakar ruang negosiasi yang disediakan oleh masyarakat anggota kelompok budaya tersebut di dalam menghadapi hal-hal yang bersifat keluar dari normalitas keseharian mereka. Pada saat yang sama, peneliti tersebut bisa memaknainya sebagai ruang negosiasi atas hal-hal yang bisa diterima oleh kebiasaan sehari-hari atau budaya mereka. Dengan demikian, kita kemudian bisa menjawab pertanyaan apakah sebenarnya sesuatu yang telah kita anggap sebagai karakteristik kita (secara budaya atau secara sosial karena hal tersebut telah terlembagakan melalui sosialisasi, misalnya training atau proses pendidikan atau proses pembudayaan lainnya dalam masyarakat) akan secara otomatis berlaku di setiap situasi, atau sebenarnya akan diterapkan secara kontekstual.

Dalam kajian sosiologi, pendekatan etnometodologi sedikit menempati posisi yang unik, terutama dalam kaitannya dengan kadar keinterpretifan pendekatannya. Pertama, meskipun gagasan *ethnomethodology* dikembangkan oleh Garfinkel didasari, untuk sebagiannya, dengan fenomenologi Schutz dan gagasan *Verstehen* yang dikemukakan oleh Max Weber sehingga tetap masuk dalam rumpun sosiologi *interpretive*, namun – boleh jadi – karena anggapan terhadap manusia yang dipakai sebagai dasar pendekatannya, yaitu sepenuhnya rasional, serta metode eksperimen *rule breaching* yang dilakukannya untuk

mendapatkan jawaban atas pertanyaan utama pendekatan ini, menjadikan pendekatan ini dipandang sebagai memiliki kadar kedekatan dengan sosiologi *functionalism* yang relatif sangat tinggi. Dalam istilah lain, etnometodologi yang dikembangkan oleh Garfinkel melihat masyarakat dengan pola "*scientific*" yang cenderung *positivistic*. Dalam salah satu kritiknya terhadap karya-karya etnometodologinya Garfinkel dan Lynch, Atkinson (1988), misalnya, mengatakan bahwa Garfinkel dan kawan-kawannya sebenarnya berusaha membangun model analisa sosiologisnya dengan sebisa mungkin menjauhi dari model *constructivist*, oleh karenanya meskipun mereka mengklaim "*constructivist*", konstruktivisme yang dibangun adalah konstruktivisme yang terlalu disederhanakan sekadar untuk mengesankan, bahwa modelnya layak masuk ke dalam kategori aliran filsafat, padahal sebenarnya masih tidak beranjak jauh dari upaya mempertahankan prosedur-prosedur penelitian yang *scientific*. Komentar lengkapnya bisa dibaca dalam kutipan berikut ini:

"Lynch, Garfinkel, and their colleagues seek to distance themselves from the constructivist view of scientific knowledge. They erect an oversimplified model of the constructivist position, claiming that it represents a "philosophy that remains endlessly embedded in academic arguments about science with no attention being paid to the endogenously produced variants and argument that constitute the technical development of ordinary scientific inquiry" (Atkinson, 1988, p. 445)

Tentu saja kritik Atkinson (1988) ini, bukan untuk mengatakan bahwa karya-karya ilmiah sosiologi dengan pendekatan etnometodologi tidak berarti atau tidak menyumbangkan kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kritik tersebut hanya ingin memberikan tekanan bahwa masih banyak orang yang salah melihat bahwa etnometodologi seperti halnya sepenuhnya sosiologi *interpretive*, yang terjadi sebenarnya, *ethnomethodology* merupakan sosiologi *interpretive* yang lebih dekat ke *functionalist*.

Radical Humanist, Radical Structuralist, Critical Theory dan Postmodernism

Paradigma keilmuan *radical humanist* memiliki ciri utama yang khas seperti komitmennya terhadap subyektivitas, *constructivist*, dan keyakinannya bahwa ilmu pengetahuan seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menaikkan harkat kemanusiaan mereka yang tertindas oleh sistem yang ada sekarang ini (*emancipatory*). Pada sisi lain, paradigma *radical structuralist* juga berkeinginan untuk melakukan emansipasi melalui aktivitas keilmuan, namun paradigma ini tidak memiliki komitmen subyektif dan konstruktivis. Menariknya, *critical theory* yang menjadi pijakan dasar paradigma kritis memanfaatkan keduanya untuk melakukan semacam upaya revisi atas paradigma-paradigma lainnya, terutama paradigma *positivist* yang masih memegangi dengan erat apa yang kita kenal dengan *grand theory* atau meta narasi. Jika dalam seksi ini, kedua paradigma sosiologis keilmuan tersebut digabungkan pembahasannya, hal ini semata-mata karena alasan kepraktisan dan karena keduanya secara kebetulan diikat oleh

Djamhuri,
 Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi

model teori yang sama, yakni *critical theory*. Dalam perkembangannya, aliran filsafat *post-modernism* bahkan ikut juga meramaikan diskursus ilmiah tentang masyarakat dan tindakan atau peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi, sehingga jika dibuatkan konfigurasi, di sekitar paradigma *radical humanist* dan *radical structuralist*, selain terdapat paradigma kritis dengan *critical theory* sebagai pijakan dasarnya, juga terdapat paradigma postmodernisme yang mengusung gagasan *anti establishment* dan *deconstructivism*.

Melihat konfigurasi paradigmatik yang seperti ini, wajar jika kemudian kita mendapatkan kenyataan bahwa gagasan filosofis utama yang melandasi perkembangan keempat paradigma yang dibicarakan dalam seksi ini adalah *marxism*. Karakteristik *marxist* paradigma-paradigma ini sangat terlihat menonjol, terutama dalam orientasi yang kuat terhadap *materialism*, *anti establishment* dan *emancpatory* atau *constructivism* (kecuali untuk *radical structuralist*, tentu saja). Di antara keempat paradigma yang dibahas dalam seksi ini, jika boleh dikatakan dengan sederhana, yang paling menarik untuk diberikan komentar khusus – barang kali – adalah *postmodernism*. Alasan sederhananya adalah karena karakteristik *eclective* dan *flexible* yang muncul dari relativitas penuh sebagai implikasi komitmen paradigma ini terhadap *nihilisme* (Kilduff & Mehra, 1997) menjadikan paradigma ini sulit dikonfigurasi menggunakan konfigurasi paradigma ilmu sosial model Burrell dan Morgan, bahkan jika terpaksa harus dikonfigurasi, paradigma ini seperti “tidak terletak

di mana pun, namun sekaligus juga terletak di mana pun”. Implikasinya, paradigma ini tidak terikat dengan konsep *paradigm incommensurability*, suatu gagasan yang mengatakan bahwa antara satu paradigma dengan paradigma lainnya pada dasarnya tidak bisa digandengkan (dikawinkan) terutama karena perbedaan asumsi dasar, orientasi dan cara-cara yang ditempuh dalam memperoleh pengetahuan (aspek ontologis maupun epistemologis). Namun demikian, setidaknya jika dilihat secara bersama-sama dengan paradigma kritis, maka keduanya sering tampil hampir serupa dengan mengusung hal yang sama, yakni perlunya dekonstruksi (Kilduff & Mehra, 1997) dan rekonstruksi masalah-masalah sosial. Pembaca tak perlu heran, bahwa dalam mendekonstruksi dan akhirnya mengkonstruksikan kembali suatu masalah sosial, para pendukung postmodernisme sering memanfaatkan teori kritis (*critical theory*), atau bahkan pendekatan penafsiran *hermeneutics* serta *semiotics* yang orang mengatakan keduanya berada di ranah *interpretive sociology*. Beberapa tokoh pendukung yang berada di aliran pemikiran ini bisa disebutkan seperti Lyotard, Nietzsche, Derrida, Foucault, Habermas, Baudrillard, Barthes, Deleuze, Kristeva, Lacan, Levinas dan sebagainya (O'Donnell, 2009).

Kajian kritis dalam akuntansi lazimnya berangkat dari keinginan yang kuat untuk melakukan emansipasi atau peningkatan derajat mereka yang tertindas dan dirugikan (setidaknya tidak diuntungkan) oleh proses sosial yang menghasilkan atau melibatkan penggunaan informasi akuntansi, baik dalam ranah publik atau-

pun dalam ranah orhanisasi secara individual. Artikel Lehman (2005) yang berjudul *A critical perspective on the harmonisation of accounting in a globalising world* bisa menjadi contoh. Melalui artikel tersebut dia mencoba memaparkan, betapa kantor-kantor akuntan besar dunia telah menggunakan auditing sebagai alat pengendalian, dan melalui agenda harmonisasi standar akuntansi dan auditing yang dijalankan kelompok-kelompok lobi internasional memaksakan kepentingannya untuk meratakan jalan bagi perluasan dan intensitas kekuasaan mereka. Dalam kondisi yang amat disayangkan di mana lembaga-lembaga pembuat standar umumnya sekadar mengikuti apa yang didiktekan secara internasional, proses harmonisasi atau bahkan kini "standarisasi" secara internasional telah menimbulkan kepincangan kekuatan (*power imbalances*) yang makin besar antara negara-negara Eropa-Amerika di satu sisi dengan negara-negara dunia ketiga di sisi lain. Setelah mengkritisi proses yang menghasilkan standar akuntansi internasional yang diklaim sebagai telah "harmoni" tersebut, artikel Lehman kemudian mencoba menawarkan solusi alternatif yang dianggap lebih memerhatikan aspek yang dilupakan oleh proses harmonisasi standar akuntansi internasional tersebut, yakni harmonisasi yang tetap memerhatikan pentingnya komitmen atas nilai "kebaikan bersama", *citizenship* dan juga demokrasi sehingga masyarakat internasional tidak malahan terhegemoni oleh kepentingan *multinational corporation* (MNC) yang makin mengurita menguasai hajat hidup orang banyak. Artikel Lehman ini melihat bahwa harmon-

isasi standar akuntansi adalah sebuah proses sosial. Proses sosial tersebut telah menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dengan merugikan kelompok lain yang lebih besar. Oleh sebab itu terdapat alasan untuk mempertanyakan mengapa demikian, dan mengapa tidak melakukan atau mengambil pendekatan lain yang lebih berkeadilan bagi semua. Artikel Lehman ini bisa dikategorikan ke dalam karya penelitian kritis tetapi sekaligus juga *post-modern*.

Harus diakui, paling tidak jika diletakkan dalam ranah perbandingan dengan paradigma keilmuan lainnya, paradigma *postmodern* mungkin paradigma yang paling sering dipahami secara negatif. Bagaimana tidak, wajah yang selalu ditonjolkan ke permukaan dari *post-modern paradigm* ini adalah wajah atau karakteristik yang memberi tekanan kepada anti keteraturan atas hal-hal yang sudah dianggap mapan (normal dan lumrah terjadi) yang dihasilkan oleh modernisme. Perhatikan kutipan pendek berikut yang menggambarkan bagaimana posmodernisme ini secara esensial memang memiliki visi ingin membebaskan masyarakat atau manusia dari belenggu hal-hal yang teratur (terstandar, termasuk norma, teori, religi dan sebagainya):

"Within the social sciences in general, the specter of postmodernism has aroused widespread anxiety. Postmodernism has been viewed as an enterprise that calls for the death of all scientific inquiry, the end of all new knowledge; the dissolution of any standards that may be used to judge one theory against another; a banishment into utter rela-

Djamhuri,
 Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi

tivism wherein a clamor of fragmented and contentious voices reigns (see Pauline Rosenau's 1992 balanced review of these concerns and Stanley Fish's [1996] recent discussion of misunderstanding of postmodernism)." (Kilduff & Mehra, 1997, p. 454)

Sebenarnya jika kehadiran postmodern dilihat dalam konteks sebagai suatu hal yang memberi ruang lebih luas dalam pengembangan keilmuan, maka tidak ada alasan ketakutan terhadap penerapannya, termasuk dalam kajian akuntansi sekalipun. *Postmodernism*, misalnya, akan memberi peluang kepada para peneliti untuk melakukan studi yang bersifat lintas disiplin (*cross disciplinary studies*) sehingga bisa dihasilkan ilmu pengetahuan tipe baru (*new genre*) yang selama ini, tentu dengan menggunakan pemahaman konvensional, tampak tidak mungkin dihasilkan. Hibridisasi keilmuan ini terasa semakin penting justru di saat fenomena sosial semakin kompleks dan makin tidak bisa diselesaikan oleh ilmu pengetahuan yang dikembangkan dengan kecenderungan "puristik" di jalurnya masing-masing.

Sekadar sebagai contoh sederhana bagaimana posmodernisme ini bisa diterapkan untuk mengkaji akuntansi, perhatikanlah misalnya masalah akuntansi yang sampai saat ini, bahkan oleh yang berpandangan konvensional sekalipun, diberi pengertian sebagai bahasa bisnis. Istilah dekonstruksi yang ada pada *Postmodernism* adalah produk pengaruh filsafat bahasanya de Saussure (1857-1913), seorang profesor linguistik dari Swiss (O'Donnell, 2009) yang membawa revolusi dalam studi bahasa. Menu-

rutnya, bahasa pada dasarnya merupakan suatu sistem tetanda (*signs* atau *symbol*), yakni tetanda hasil suatu proses konstruksi sosial. Bahasa bukan merupakan ide lepas yang tanpa batas waktu yang abstrak. Jika dibandingkan dengan kata (*word*), bahasa merepresentasikan seluruh sistem dengan struktur dan peraturan yang menjadi landasannya, sedangkan kata hanyalah tetanda di mana setiap tetanda selalu terbentuk dari kombinasi antara obyek dan nama. Saussure berpendapat bahwa representasi obyek oleh nama (atau bunyi) berlangsung secara *arbitrer* (sewenang-wenang), artinya setiap penanda bisa dipakai secara berbeda di setiap kebudayaan (secara sosial), meskipun peraturan yang melandasinya sama (O'Donnell, 2009). Karena kata adalah konstruksi sosial, maka ia memiliki makna sosialnya yang sesuai dengan konteks di mana kata tersebut diproduksi. Dengan demikian, dekonstruksi bukanlah suatu metode tertentu atau suatu program yang sistematis, tetapi lebih sebagai cara membaca teks yang mampu menemukan kembali detail-detail kecil yang terlampaui atau hilang (sebagai akibat konstruksi sosial tertentu saat kata atau tanda tersebut terbentuk) sehingga bisa memberi ruang bagi berlakunya pandangan atau tafsiran lain.

Jika demikian, akuntansi yang merepresentasikan suatu bahasa, yakni bahasa bisnis, yang juga penuh dengan tetanda dan aturan akan sangat mungkin menjadi obyek dekonstruksi. Petama, sebagai bahasa yang penuh dengan tetanda (*symbols*), konsep-konsep akuntansi tentu telah mengalami dan merupakan hasil suatu proses konstruksi sosial, tidak

mungkin akuntansi ada begitu saja. Kedua, adalah sangat mungkin bahwa proses sosial yang berlangsung dalam mana konsep atau standar dan aturan lain dalam akuntansi mengalami proses pembentukannya (konstruksinya) telah menghilangkan atau menutupi detail-detail kecil tertentu yang sebenarnya penting sehingga apa yang terbentuk tidak lagi suatu konsep yang utuh. Dekonstruksi, melalui pembacaan kembali teks, dalam hal ini konsep-konsep yang ada dalam akuntansi, mencoba menghadirkan kembali detail-detail kecil yang terhilangkan tersebut, sehingga bisa dihasilkan konsep yang memberi makna lebih lengkap atau lebih utuh. Beberapa kajian yang telah dilakukan di Jurusan Akuntansi seperti tentang konsep Laba Humanis bisa masuk dalam kategori kajian *postmodernism*. Sangat mungkin kajian akuntansi dengan warna *postmodernist* ini tidak berhenti sebatas mempersoalkan masalah konsep laba, lebih dari itu, kita bisa melakukan dekonstruksi tentang konsep *fair value*, misalnya. Konsep *Fair Value* dilihat dari sisi *postmodernism* pastilah telah terbentuk melalui proses sosial, sehingga muncul atribut “fair” terhadap “value” yang dipakai. Untuk ini kita bisa mengajukan pertanyaan “*fair for whom?*”, “*Who should determine fairness?*”. Dalam ranah ilmu sosial, hilangnya suatu detail atau aspek tertentu dalam pembentukan kata atau tetanda tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Pertama, proses sosial lazimnya memang berlangsung sebagai suatu arena negosiasi yang melibatkan *power* atau kekuatan mereka yang terlibat. Kedua, orientasi dan latar belakang budaya bisa menjadi pe-

nyebab satu aspek dipandang kurang penting dibanding yang lain.

Penutup

Sebagai suatu kesimpulan, dapat dikatakan di sini bahwa, pertama, akuntansi adalah disiplin yang multiparadigmatik. Kedua, kajian tentang akuntansi saat ini tengah mengalami transisi. Soal apakah transisi ini tergolong pada transisi paradigmatik seperti yang digambarkan oleh Kuhn (1962) atau sekadar transisi metodologis, setiap orang bisa saja berbeda pendapat tentang hal ini. Namun tanda-tanda bahwa kajian akuntansi mengalami situasi yang transisional tampak jelas bisa kita saksikan. Munculnya ke permukaan akuntansi syariah, suatu *genre* akuntansi yang disandarkan pada tata nilai agama (baca: sesuatu yang dalam ranah positif dipandang metafisika dan tak memenuhi persyaratan ilmu pengetahuan) merupakan satu bukti yang nyata. Sementara itu, kini bahkan komunitas internasional tengah mendorong kalangan akuntansi untuk memberi perhatian yang lebih besar tentang lingkungan dan keadilan antar generasi yang terbungkus dalam apa yang dikenal dengan aspek *sustainability*. Dalam masa yang tidak terlampau lama bisa diperkirakan bahwa laporan keuangan, bahkan yang sudah disusun berdasarkan konsep *fair value*, akan tidak lagi dipandang mencukupi jika belum melaporkan aspek *sustainability*. Ketiga, perspektif-perspektif dalam ilmu pengetahuan sosial, terutama sosiologi, mampu membuka ruang yang lebih luas bagi para peneliti atau calon peneliti akuntansi untuk mengkaji masalah atau problema dalam ilmu akuntansi

Djamhuri,
*Ilmu
 Pengetahuan
 Sosial Dan
 Berbagai
 Paradigma
 Dalam Kajian
 Akuntansi*

dari sisi-sisi lain yang selama ini tidak diperhatikan.

Sejauh mana keberlanjutan dan keberhasilan upaya-upaya terobosan yang telah dicoba lakukan oleh beberapa kalangan di lingkungan akademisi akuntansi, bahkan di Indonesia, untuk melakukan kajian-kajian akuntansi alternatif akan sangat tergantung dari iklim akademis yang dihadapi. Manakala iklim akademis yang dihadapi cukup kondusif, misalnya ditandai dengan sikap keterbukaan dalam diskursus keilmuan, minat yang relatif tinggi pada kajian-kajian ilmu sosial dan filsafat di perguruan-perguruan tinggi, maka sangat bisa diharapkan bahwa kehadiran kajian akuntansi alternatif justeru akan disambut dengan gembira. Semoga bermanfaat

DAFTAR RUJUKAN

- Appelrouth, S., and Edles, L.D. 2007. *Sociological Theory in the Contemporary Era: text and Readings*. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.
- Atkinson, P. 1988. Ethnomethodology: A Critical review. *Annual Review of Sociology, 14*, 441-465.
- Belkaoui, A. R. 1992. *Accounting Theory* (Third ed.). London: Academic Press.
- Burrell, G., and Morgan, G. 1979. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life*. Aldershot, England: Ashgate Publishing Limited.
- Chua, W.F. 1988. Interpretive Sociology and Management Accounting Research - A Critical Review. *Accounting, Auditing & Accountability Journal, 1*(2), 59-79.
- Covaleski, M.A., and Aiken, M. 1986. Accounting and Theories of Organizations: Some Preliminary Considerations *Accounting Organizations and Society, 11*(4/5), 297-319.
- Covaleski, M.A., Evans, J.H., Luft, J.L., and Shields, M.D. 2003. Budgeting Research: Three Theoretical Perspectives and Criteria for Selective Integration. *Journal of Management Accounting Research, 15*, 3-49.
- Dillard, J.F., and Becker, D.A.A. 1997. Organizational Sociology and Accounting Research Or Understanding Accounting in Organizatons Using Sociology. In V. Arnold & S. G. sutton (Eds.), *Behavioral Accounting Research Foundation and Frontiers* (pp. 247-274). Sarasota, Florida: American Accounting Association.
- Farazmand, A. 1999. Globalization and public administration. *Public Administration Review, 59*(6), 509-522.
- Gioia, D.A., and Pitre, E. 1990. Multiparadigm Perspectives on Theory Building. *Academy of Management Review, 15*(4), 584-602.
- Hopper, T., and Powell, A. 1985. Making Sense of Research into the Organizational and Social Aspects of Management Accounting: A Review of Its Underlying Assumptions. *Journal of Management Studies 22*(5), 429-465.
- Hopwood, A. 1976. *Accounting and Human Behaviour* (First American ed.). New

- Jersey: Prentice-Hall.
- Hopwood, A.G. 2007. Whither Accounting Research? *The Accounting Review*, 82(5), 1365-1374.
- Jensen, M. C. 1983. Organization Theory and Methodology. *The Accounting Review*, LVIII(2), 319-339.
- Kilduff, M., and Mehra, A. 1997. Postmodernism and Organizational Research. *Academy of management Review*, 22(2), 453-481.
- Kuhn, T.S. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions* (Second enlarged) ed. Vol. 1 & 2). Chicago: University of Chicago Press.
- Lee, T. 1997. The editorial gatekeepers of the accounting academy. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10(1), 11-30.
- Lehman, G. 2005. A critical perspective on the harmonisation of accounting in a globalising world. *Critical Perspectives on Accounting*, 16, 975-992.
- O'Donnell, K. 2009. *Postmodernisme* (J. Riberu, Trans.). Yogyakarta: Kanisius.
- Perks, R.W. 1993. *Accounting and Society* (First ed.). London: Chapman & Hall.
- Rosenbloom, D., and Yaroni, A. 1992. The Transferability of New Public Management Reforms: Caveat from Israel. *Public Policy in Israel*, 81-99.
- Roslender, R. 1992. *Sociological Perspectives on Modern Accountancy* London: Routledge.
- Smith, M. J. 1998. *Social Science in Question*. London: SAGE Publications.
- Zafirovski, M. 2003. Orthodoxy and Heterodoxy in Analyzing Institutions: Original and New Institutional Economics Re-examined. *International Journal of Social Economics*, 30(7), 798-826.